





ISBN: -
Nomor Publikasi: 06300.2115
Katalog: 3201036
<b>Ukuran Buku</b> : 21,59 x 27,94 cm
Jumlah Halaman: x + 50 halaman
Naskah:
Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
00.
Penyunting:
Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
Desain Kover oleh:
Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
Penerbit:
Badan Pusat Statistik
Pencetak:
Badan Pusat Statistik
Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan

sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat

Statistik.

### **TIM PENYUSUN**

Penasehat Umum : Setianto

Penanggung Jawab Umum : Titi Kanti Lestari

Penanggung Jawab Teknis : Rifa Rufiadi

Penyunting : Rifa Rufiadi

Wahyu Sunyoto Jati

Penulis : Peni Candraningtyas

Wahyu Sunyoto Jati

Fadhlullah

Iwan Fathi Fauzan Naning Tri Suhesti

Penyiapan Data : Peni Candraningtyas

Fadhlullah

Rahmad Basuki Iwan Fathi Fauzan Naning Tri Suhesti

Tata Letak dan Perwajahan : Iwan Fathi Fauzan

Naning Tri Suhesti

NitiPS: Ilmmin lops. 90 i.d.

**KATA PENGANTAR** 

Publikasi Konsumsi Bahan Pokok 2019 menyajikan data konsumsi/penggunaan bahan

pokok yang meliputi beras, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam/bebek/itik, ikan, dan

jagung tingkat provinsi dan tingkat nasional. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi

ini merupakan penggabungan dari konsumsi bahan pokok yang diolah di dalam rumah tangga

dan konsumsi bahan pokok di luar rumah tangga. Data konsumsi di dalam rumah tangga

diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2019, sedangkan data

konsumsi di luar rumah tangga diperoleh dari beberapa survei yang dilakukan oleh subject

matter pada Direktorat Statistik Industri dan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi,

dan Pariwisata.

Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat

dalam publikasi ini. Diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pemerintah

dalam mengambil langkah-langkah kebijakan pangan nasional, serta pihak lain yang

berkepentingan dengan masalah bahan pokok.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan publikasi ini masih terdapat berbagai

kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik membangun sangat kami harapkan untuk

perbaikan dan penyempurnaan publikasi di masa yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2021

Kepala Badan Pusat Statistik

Mauri.

Margo Yuwono

NitiPS: Ilmmin lops. 90 i.d.

### **DAFTAR ISI**

		·	alamar
КАТА	PEN	GANTAR	v
DAFT	AR IS	SI	vi
DAFT	AR T	ABEL	i
BAB I	F	PENDAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	3
		Tujuan	
		Ruang Lingkup	
		Keterbatasan	
		METODOLOGI	
BAB I			
	2.1	Jenis dan Sumber Data	S
		Survei Sosial ekonomi Nasional, Susenas 2019	
	2.3	Survei Jasa Akomodasi, VHTL 2020	9
	2.4	Survei Usaha Penyedia Makan Minum berskala Menengah Besar Tahun 2020	11
	2.5	Survei Usaha Penyedia Makan Minum berskala Mikro Kecil Tahun 2020	12
	2.6	Survei Industri Mikro dan Kecil 2019 Tahunan (VIMK)	14
	2.7	Konsep Definisi	14
	2.8	Metode Perkiraan Konversi Bahan Pokok	20
BAB I	II F	PEMBAHASAN	23
	3.1	Konsumsi Beras	25
	3.2	Konsumsi Daging Sapi dan Kerbau	31
		Konsumsi Daging Ayam	
		Konsumsi Telur Ayam Ras dan Telur Bebek/Itik	
		Konsumsi Ikan Segar	
		Konsumsi lagung	47

NitiPS: Ilmmin lops. 90 i.d.

### **DAFTAR TABEL**

	Hal	laman
Tabel 3.1	Konsumsi Beras Menurut Institusi Pengguna, 2011-2019	27
Tabel 3.2	Total Konsumsi Beras per Tahun Menurut Provinsi (ribu ton), 2017 dan 2019	29
Tabel 3.3	Konsumsi Beras per Kapita per Tahun Menurut Provinsi (kg), 2017 dan 2019	30
Tabel 3.4	Konsumsi Daging Sapi dan Kerbau Menurut Institusi Pengguna, 2014-2019	31
Tabel 3.5	Total Konsumsi Daging Sapi dan Kerbau Menurut Provinsi (ton), 2017 dan 2019	33
Tabel 3.6	Konsumsi Daging Sapi dan Kerbau per Kapita per Tahun Menurut Provinsi (kg), 2017 dan 201	9 34
Tabel 3.7	Konsumsi Daging Ayam Menurut Institusi Pengguna, 2015-2019	35
Tabel 3.8	Total Konsumsi Daging Ayam per Tahun Menurut Provinsi (ton), 2017 dan 2019	37
Tabel 3.9	Konsumsi Daging Ayam per Kapita per Tahun Menurut Provinsi (kg), 2017 dan 2019	38
Tabel 3.10	Konsumsi Telur Ayam dan Telur Bebek/Itik Menurut Institusi Pengguna, 2017 dan 2019	40
Tabel 3.11	Konsumsi Telur Ayam dan Telur Bebek/Itik Menurut Provinsi (ton), 2017 dan 2019	41
Tabel 3.12	Konsumsi Telur Ayam dan Telur Bebek/Itik Per Kapita per TahunMenurut Provinsi (ton), 201	7 dan
	2019	42
Tabel 3.13	Konsumsi Ikan Segar Menurut Institusi Pengguna, 2017 dan 2019	43
Tabel 3.14	Konsumsi Ikan Segar Menurut Provinsi (ton), 2017 dan 2019	45
Tabel 3.15	Konsumsi Ikan Segar per Kapita per Tahun Menurut Provinsi (kg), 2017 dan 2019	46
Tabel 3.16	Konsumsi Jagung Menurut Institusi Pengguna, 2014-2019	47
Tabel 3.17	Konsumsi Jagung Menurut Provinsi (ton), 2017 dan 2019	49
Tabel 3.18	Konsumsi Jagung per Kapita per Tahun Menurut Provinsi (kg), 2017 dan 2019	50

NitiPS: Ilmmin lops. 90 i.d.

### PENDAHULUAN

NitiPS: Ilwww.lops.90.id

### 1.1 Latar Belakang

RPJMN 2015-2019 merupakan RPJMN Fase III dalam siklus Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan fokus pada peningkatan keunggulan sumber daya manusia, sumber daya alam serta daya saing yang didukung oleh ilmu pengetahun dan teknologi. RPJMN Bidang Pangan dan Pertanian 2015-2019 telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019. Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang salah satu kontribusinya digambarkan dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyedia bahan pakan serta bioenergi. Sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik. Salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, serta mencanangkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, upaya penting yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia adalah pembangunan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, yang diarahkan untuk menopang kekuatan ekonomi domestik.

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Ketahanan pangan nasional masih menjadi isu yang penting bagi Indonesia mengingat kecukupan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat, ketahanan pangan yang

dibangun di Indonesia harus memenuhi kriteria cukup secara berkelanjutan bagi seluruh penduduk, terutama dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman dan terjangkau dari waktu kewaktu. Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya serta stabil penyediaannya sesuai permintaan dari waktu ke waktu.

Konsumsi pangan merupakan jumlah pangan, secara tunggal atau beragam, yang dikonsumsi seseorang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis, maupun sosiologisnya. Pemenuhan konsumsi pangan diprioritaskan pada konsumsi pangan bahan pokok khususnya bahan pangan pokok seperti beras, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam/bebek/itik, ikan dan jagung. Bahan pokok tersebut merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat seperti kalori, protein, lemak, vitamin, dan mineral.

Tingginya ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap konsumsi bahan pokok, menyebabkan bahan pokok tersebut memiliki nilai strategis baik secara politik maupun ekonomi. Pada tahun 2011 Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementrian Pertanian bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan kajian khusus mengenai konsumsi beras dengan berbagai pendekatan yang didasarkan pada berbagai sumber data, yaitu Susenas, Survei Industri, Survei Konsumsi dan Cadangan Beras Nasional, serta Tabel Input Output. Kemudian pada tahun 2012 BPS melakukan Survei Konsumsi Beras Nasional untuk melengkapi data yang masih belum tersedia untuk penghitungan konsumsi beras pada tahun 2011.

Berdasarkan hasil kajian tersebut dan berbagai perkembangan beberapa tahun terakhir yang ditandai gejolak beberapa harga bahan pokok, seperti daging sapi, maka telah dilakukan kajian lebih lanjut dengan ruang lingkup yang lebih luas dan tidak hanya beras. Hal ini dikarenakan tingkat ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh beras, tetapi juga komoditas lain, seperti daging ayam, telur ayam/bebek/itik, ikan segar dan daging sapi. Untuk itu, pada tahun 2014, 2015 dan 2017 dilakukan Survei Konsumsi Bahan Pokok yang hasilnya akan digunakan untuk memperkirakan jumlah konsumsi beberapa komoditas bahan pokok pada tingkat nasional untuk usaha-usaha yang diperkirakan menggunakan bahan pokok tersebut sebagai bahan baku. Pada tahun 2020 dilakukan kembali survei untuk mendapatkan data komoditas bahan pokok di tahun 2019, melalui Survei Penyedia Makan Minum berskala mikro dan kecil (VREST20\_UMK). Disamping itu, tingkat penyajiannya adalah level nasional.

### 1.2 Tujuan

Tujuan dari publikasi Konsumsi Bahan Pokok tahun 2019 ini adalah untuk mendapatkan angka perkiraan konsumsi/penggunaan bahan pokok meliputi beras, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam/bebek/itik, ikan, dan jagung di tingkat provinsi, serta estimasi di tingkat nasional untuk kelima bahan pokok tersebut.

### 1.3 Ruang Lingkup

Publikasi konsumsi bahan pokok 2019 ini bertujuan untuk mengetahui konsumsi beras, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam/bebek/itik, ikan, dan jagung di tingkat provinsi, serta estimasi kelima bahan pokok tersebut di tingkat nasional. Penghitungan dilakukan dengan cara menggabungkan konsumsi bahan pokok yang diolah di dalam rumah tangga dan konsumsi bahan pokok diluar rumah tangga. Konsumsi bahan pokok di dalam rumah tangga diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2019. Sedangkan konsumsi bahan pokok di luar rumah tangga diperoleh dari gabungan beberapa survei yang terkait dengan horeka (Hotel, Restoran dan Katering), dan survei yang terkait dengan survei di sektor industri. Yang terkait dengan horeka diperoleh dari hasil Survei Jasa Akomodasi 2020, Survei Penyedia Makan Minum untuk Usaha Menengah dan Besar 2020 (VREST2020\_UMB), dan serta Survei Penyedia Makan Minum untuk Usaha Mikro dan Kecil 2020 (VREST\_UMK). Sedangkan dari sektor industri diperoleh dari Survei Industri Mikro dan Kecil 2019 Tahunan (VIMK) dan Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur (STPIM 2019).

### 1.4 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan hasil publikasi konsumsi bahan pokok yang perlu disebutkan terkait dengan sumber data untuk penghitungan konsumsi bahan pokok, antara lain:

- 1. Meskipun Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencakup seluruh wilayah Indonesia dan dapat digunakan untuk mengestimasi sampai dengan level provinsi, terjadinya underestimate tentang konsumsi bahan pokok khususnya yang diolah di dalam rumah tangga sangat mungkin terjadi, mengingat cara pengumpulan data Susenas yang dilakukan tidak dengan metode pencatatan harian tetapi dengan mengingat konsumsi selama seminggu yang lalu (recall);
- 2 Pendekatan establishment untuk menghitung penggunaan/konsumsi bahan pokok di luar rumah tangga beresiko tidak tercatatnya konsumsi makanan jadi yang berasal dari rumah tangga lain (bukan establishment), karena makanan jadi yang berasal dari rumah tangga lain hanya tercatat

- di Susenas, sementara publikasi ini tidak menghitung konsumsi bahan pokok pada makanan jadi hasil Susenas;
- 3 Informasi tentang konsumsi merupakan gambaran kebutuhan/permintaan, dan tidak selalu mencerminkan volume bahan pokok yang dikonsumsi manusia;
- 4 Interpretasi hasil konsumsi bahan pokok yang disajikan di masing-masing provinsi tidak selalu mencerminkan besaran konsumsi bahan pokok penduduk provinsi yang bersangkutan. Mengingat cakupan responden antara lain adalah usaha jasa akomodasi, usaha penyedia makan minum, dan usaha industri maka besaran konsumsi bahan pokok perkapita di provinsi "lebih" mencerminkan "kebutuhan ketersediaan" bahan pokok di provinsi yang bersangkutan.

METODOLOGI 2

NitiPS: Ilwww.lops.90.id

### 2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data konsumsi bahan pokok baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga seperti usaha hotel, restoran/rumah makan, katering, warung makan dan penyedia makan minum lainnya, serta usaha industri pengolahan. Sumber data yang digunakan dalam memperkirakan konsumsi bahan pokok di dalam rumah tangga diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2019, sedangkan untuk menghitung memperkirakan konsumsi bahan pokok di luar rumah tangga diperoleh dari Survei Jasa Akomodasi (VHTL) tahun 2020, dan Survei Penyedia Makan Minum (VREST) UMB tahun 2020, Survei Penyedia Makan Minum (VREST) UMK tahun 2020, Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur (STPIM 2019, dan Survei Industri Mikro dan Kecil 2019 Tahunan (VIMK). Dari beberapa sumber data tersebut diharapkan mampu mencakup semua konsumsi/kebutuhan bahan pokok pada rumah tangga dan diluar rumah tangga.

### 2.2 Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas 2019

Desain sampel Susenas 2019 dibuat bersamaan dengan kegiatan pengukuran status gizi balita. Pelaksanaan Susenas dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun (semesteran), yaitu di bulan Maret untuk estimasi kabupaten/kota, dan di bulan September untuk estimasi provinsi. Jumlah sampel Susenas 2019 untuk estimasi kabupaten/kota adalah 300.000 rumah tangga. Sampel rumah tangga yang sama digunakan untuk pengukuran status gizi balita.

### 2.3 Survei Jasa Akomodasi, VHTL 2020

### 2.3.1 Cakupan

Unit penelitian dalam survei ini adalah usaha atau perusahaan yang dalam kegiatannya merupakan penyedia akomodasi yang terdapat di 34 provinsi dan tersebar di 498 kabupaten/kota. Secara lengkap, perusahaan yang dicakup berdasarkan pengelompokan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit yang termasuk kategori I (Penyedia Jasa Akomodasi) adalah sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	KBLI	Deskripsi
	55111	Hotel Bintang Lima
	55112	Hotel Bintang Empat
Hotel Bintang	55113	Hotel Bintang Tiga
	55114	Hotel Bintang Dua
	55115	Hotel Bintang Satu
Hotel Non Bintang	55120	Hotel Melati
	55191	Penginapan Remaja
	55130	Pondok Wisata (Home Stay)
	55194	Villa
Penyedia Jasa Akomodasi Lainnya	55195	Apartemen Hotel
Akomodasi Lammya	55192	Bumi Perkemahan
	55193	Persinggahan Karavan
	55199	Penyedia Akomodasi Jangka Pendek Lainnya

Tidak termasuk KBLI 55900, seperti rumah kos, asrama sekolah, asrama pegawai, dan lain-lain.

### 2.3.2 Kerangka Sampel

Kerangka sampel usaha/perusahaan yang digunakan adalah daftar usaha/perusahaan hasil direktori jasa akomodasi yang dilengkapi dengan informasi alamat dan jenis akomodasi. Jumlah usaha yang dilakukan pendataan didasarkan pada jumlah usaha/perusahaan penyedia jasa akomodasi yang ada pada masing masing kabupaten/kota.

### 2.3.3 Desain Sampel

Desain sampling yang diterapkan dalam Survei Perusahaan/Usaha Penyedia Jasa Akomodasi Tahunan 2020 yaitu seluruh usaha/perusahaan yang tercakup dalan jasa akomodasi baik yang tergolong sebagai hotel berbintang, hotel non bintang, maupun usaha/perusahaan lainnya dilakukan pencacahan lengkap. Jumlah usaha/perusahaan yang didata di seluruh provinsi ada sebanyak 29.243 usaha/perusahaan.

### 2.3.4 Daftar Sampel VHTL\_20

Daftar Sampel VHTL-20 adalah daftar yang memuat nama usaha/perusahaan yang akan dicacah secara lengkap pada pelaksanaan Survei Perusahaan/Usaha Penyedia Jasa Akomodasi Tahun

2020. Berdasarkan daftar ini, pencacah mengunjungi dan melakukan pencacahan usaha/perusahaan yang menjadi beban tugasnya. Daftar sampel VHTL-20 ini dapat diunduh (download) langsung melalui program aplikasi web entri yang digunakan untuk pengolahan data VHTL-20.

### 2.4 Survei Usaha Penyedia Makan Minum berskala Menengah dan Besar Tahun 2020

Survei Usaha Penyedia Makan Minum (PMM) atau VREST sebelumnya disebut dengan Survei Restoran/Rumah Makan. Respondennya adalah restoran, rumah makan, dan usaha penyedia makan minum lainnya, kecuali bar dan club malam. Sebelumnya survei ini dilakukan secara sampel, sejak tahun 2019 dilakukan secara sensus. Artinya bahwa semua usaha penyedia makan minum yang berstatus UMB adalah menjadi target sampel.

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Survei PMM mengakomodir pertanyaan penggunaan bahan pokok pada usaha penyedia makan minum. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data penggunaan beberapa bahan pokok diluar penggunaan oleh rumah tangga.

### 2.4.1 Cakupan

Unit penelitian dalam survei ini adalah usaha/perusahaan yang dalam kegiatannya merupakan penyedia makan minum berskala menengah besar (UMB). Survei ini dilakukan di 34 provinsi. Perusahaan yang dicakup berdasarkan pengelompokan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang termasuk kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Penyedia Makan Minum) kode dua digit 56 (Penyedia Makan Minum).

### 2.4.2 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari

- a. Data Direktori usaha/perusahaan penyedia makanan dan minuman yang bersumber dari data Statistical Business Register (SBR) yang dilengkapi dengan informasi alamat dan KBLI 5 digit.
- b. Data usaha/perusahaan SE2016-Lanjutan kode KBLI dua digit 56 (Penyedia Makan Minum)
   yang dilengkapi dengan informasi alamat dan KBLI 5digit jaringan usaha bukan unit
   pembantu/penunjang

### 2.4.3 Jumlah Sampel

Jumlah sampel didasarkan pada jumlah usaha/perusahaan penyedia makan minum yang ada pada masing-masing provinsi. Jumlah sampel usaha/perusahaan yang didata di seluruh provinsi.

### 2.4.4 Desain Sampling

Desain sampling yang diterapkan dalam Survei Penyedia Makan Minum 2020 adalah pencacahan lengkap dari usaha/perusahaan yang dalam kegiatannya tergolong sebagai penyedia makan minum berskala menengah besar.

### 2.5 Metodologi Survei Usaha Penyedia Makan Minum berskala Mikro dan Kecil Tahun 2020

### 2.5.1 Cakupan

Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan atau usaha yang dalam kegiatannya menggunakan atau mengkonsumsi bahan pokok yang dicakup dalam survei yaitu beras, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam ras/bebek/itik, ikan segar dan hewan air lainnya (selain rumput laut). Sedangkan menurut cakupan wilayah, survei dilakukan di 247 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Perusahaan/usaha yang dicakup dalam survei ini adalah perusahaan/usaha mikro kecil dengan kegiatan utama yang berdasarkan pengelompokan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) termasuk kategori I (Penyedia Akomodasi dan Penyedia Makan Minum) kode dua digit 56 (Penyedia Makan Minum). Adapun cakupan KBLI pada Survei Usaha Penyedia Makan Minum UMK tahun 2020 secara lengkap adalah sebagai berikut:

Kategori	Deskripsi KBLI 2015	KBLI 2015
	Restoran	56101
	Warung Makan	56102
	Kedai Makan	56103
Donyodio	Penyedia Makanan keliling/ tempat tidak tetap	56104
Penyedia Makan	Jasa boga untuk suatu event tertentu	56210
Minum	Penyedia makan lainnya	56290
IVIIIIUIII	Rumah Minum/Cafe	56303
	Kedai Minum	56304
	Rumah/Kedai obat tradisional	56305
	Penyedia minuman keliling/ tempat tidak tetap	56306

### 2.5.2 Kerangka sampel

Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari 3 macam yaitu:

- Kerangka sampel pemilihan tahap pertama adalah master kabupaten yang disertai dengan informasi jumlah usaha penyedia akomodasi dan makan minum yang menjadi cakupan
- Kerangka sampel pemilihan tahap kedua adalah usaha penyedia makan minum adalah master
   BS dari hasil pendataan usaha Sensus Ekonomi 2016-L2 yang berisi informasi muatan jumlah usaha penyedia makan minum yang menjadi cakupan.

c. Kerangka sampel pemilihan tahap ketiga yaitu daftar rumah tangga yang mengusahakan penyedia makan minum yang menjadi cakupan dalam blok sensus terpilih

### 2.5.3 Desain sampel

Desain sampling yang diterapkan dalam Survei Usaha Penyedia Makan Minum UMK tahun 2020 dibagi menjadi 3 tahap sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, memilih 247 kabupaten sampel. Dilakukan secara PPS dengan size banyaknya usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dalam tiap kabupaten;
- b. Tahap kedua, memilih blok sensus dengan cara PPS dengan *size* banyaknya usaha penyediaan makan minum pada tiap blok sensus;
- c. Tahap ketiga, memilih rumah tangga usaha penyediaan makan minum hasil *updating*/listing pada BS terpilih dengan cara sistematik sampling.

"Alokasi sampel usaha rumah tangga penyediaan makan minum pengguna bahan pokok dalam tiap blok dilakukan di BPS RI setelah proses pendaftaran rumah tangga/usaha selesai dilakukan. Alokasi dilakukan secara terpusat dengan melihat distribusi usaha/ perusahaan menurut komoditas yang dikonsumsi hasil pendaftaran rumah tangga untuk menghasilkan estimasi konsumsi bahan pokok menurut jenis komoditas tersebut."

### 2.5.4 Jumlah Sampel

Banyaknya sampel usaha/perusahaan yang ditargetkan untuk didata adalah 23.780 usaha/perusahaan. Alokasi sampel kabupaten menurut provinsi menggunakan cara compromise allocation.

Alokasi usaha menurut jenis komoditas secara nasional, provinsi, maupun kabupaten dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan distribusi usaha hasil *updating*/listing sehingga proses alokasi menunggu hasil *updating*/listing pada seluruh blok sensus selesai dilakukan

### 2.5.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari usaha/perusahaan terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden dengan menggunakan CAPI. Untuk perusahaan-perusahaan yang relatif besar, pengumpulan data bisa dilakukan lebih dari satu kali kunjungan.

Untuk mencacah usaha/perusahaan penyedia makan minum, sesuai dengan desainnya maka terlebih dahulu dilakukan *updating*/listing pada blok sensus terpilih. *Updating*/listing dilakukan pada rumah tangga sebagai pendekatan untuk mendapatkan usaha/perusahaan penyedia makan minum dengan menggunakan **Daftar VREST20-L** 

### 2.6 Survei Industri Mikro dan Kecil 2019 Tahunan (VIMK)

VIMK19-Tahunan ini dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota potensi IMK pada seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah blok sensus terpilih sebanyak 13.797 blok sensus dan mencakup 90.529 usaha/perusahaan. Sasaran pencacahan meliputi usaha/perusahaan Industri Mikro (IM) yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1 s.d. 4 orang dan Industri Kecil (IK) dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 s.d. 19 orang termasuk pengusaha/pemilik.

### 2.7 Konsep Definisi

Terdapat beberapa konsep dan definisi yang terkait. Penjelasan dari konsep dan definisi tersebut di antaranya sebagai berikut:

### Rumah Tangga dibedakan menjadi dua, yaitu:

### a. Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household)

Rumah Tangga Biasa (*Ordinary Household*) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Contoh rumah tangga biasa, di antaranya: orang yang tinggal bersama istri dan anaknya; orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makannya sendiri; pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anggota rumah tangga lain yang makan dari satu dapur terpisah dari lembaga yang diurusnya; masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri.

### b. Rumah Tangga Khusus (Special Household)

Rumah Tangga Khusus (*Special Household*) adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.

Kajian konsumsi bahan pokokini hanya merujuk pada konsumsi bahan pokok pada rumahtangga biasa seperti yang dikumpulkan melalui Susenas, akan tetapi anggota rumah tangga pada rumah tangga khusus diperhitungkan dalam penimbang, sehingga pada kajian ini seluruh penduduk baik yang hidup di rumah tangga biasa maupun rumah tangga khusus dicakup dalam angka perkiraan konsumsi.

### Konsumsi

Konsumsi bahan pokok dalam kajian ini mencakup bahan pokok yang digunakan untuk konsumsilangsung oleh manusia maupunkonsumsiatau penggunaan yang dilakukan untuk selain manusia, misalnya untuk bahan baku industri pengolahan. Penghitungan konsumsi bahan pokok di rumah tangga mengacu pada konsep yang digunakan oleh Susenas. Dalam konsep Susenas, yang dimaksud dengan konsumsi adalah makanan atau bahan makanan yang benar-benar dikonsumsi oleh anggota rumah tangga. Sebagai contoh, konsumsi beras untuk keperluan pesta tidak dicatat pada rumah tangga yang mengadakan pesta tetapi dicatat sebagai konsumsi makanan jadi pada rumah tangga yang datang ke pesta dan mengkonsumsinya. Konsumsi pada Susenas tidak mencakupkomoditas yang sudah dimasak atau diolah namun tidak dikonsumsi oleh anggota rumah tangga tersebut karena basi atau terbuang. Sementara itu, konsep konsumsi atau penggunaan pada Industri pengolahan dan usaha penyedia makanan dan minuman merujuk pada input/penggunaan komoditasuntuk sektor tersebut.

### **Bahan Pangan Pokok**

Bahan pangan pokok yang dihitung konsumsinya pada kajian ini terdiri dari;

- a. **Beras,** meliputi beras dan beras ketan. Dalam penyajian penghitungan disetarakan ke bentuk **beras**.
- Daging sapi dan daging kerbau, meliputi daging sapi dan daging kerbau segar, daging sapi dan daging kerbau beku.
- c. **Daging ayam**, meliputi daging ayam ras (ayam potong), daging ayam buras (ayam kampung), tetapi tidak termasuk jeroan.
- d. **Telur ayam ras dan telur bebek/itik**, meliputi telur ayam ras dan telur bebek/itik, tetapi tidak termasuk telur ayam buras (telur ayam kampung).
- e. **Ikan segar dan hewan air lainnya,** meliputi ikan tuna/tongkol/cakalang, ikan lele, ikan mas/nila, ikan kembung/banyar, ikan bandeng, ikan mujaer, ikan lainnya, dan hewan air selain ikan, tetapi tidak termasuk rumput laut.

### Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek

Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek adalah penyediaan akomodasi, khususnya untuk harian atau mingguan, pada prinsipnya untuk tinggal dalam jangka pendek sebagai pengunjung. Termasuk penyediaan akomodasi dengan furnitur, lengkap dengan dapur, dengan atau tanpa jasa pramuwisma dan sering kali termasuk beberapa tambahan jasa dan fasilitas seperti fasilitas parkir, binatu, kolam renang, ruang olahraga, fasilitas rekreasi dan ruang rapat. Termasuk juga akomodasi yang disediakan oleh berbagai macam hotel, penginapan, losmen, hostel, villa dan lain-lain. (KBLI 2015). Dalam kajian ini, yang dicakup hanya perusahaan/usaha hotel berbintang.

### Hotel

**Hotel** adalah usaha penyediaan akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. Hotel bintang meliputi hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua, dan hotel bintang satu.

### Restoran/Rumah Makan

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatandan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya. (KBLI 2015).

### Jasa Boga/Catering

Kelompok ini mencakup penyediaan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu even tertentu. Kelompok ini mencakup usaha penjualan makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan untuk kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya. Biasanya makanan jadi yang dipesan diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta/seminar berlangsung. (KBLI 2015).

### **Warung Makan**

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan dan menjual makanan dan minuman di tempat

usahanya baik dilengkapi maupun tidak dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan maupun penyimpanan dan **belum mendapatkan ijin dan surat keputusan** dari instansi yang membinanya. (KBLI 2015).

### Kedai Makan

Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai *seafood*, pecel ayam dan lain-lain. (KBLI 2015).

### **Kedai Minum**

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya. (KBLI 2015).

### Kafe/Rumah Minum

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan utamanya minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpananmaupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum. (KBLI 2015).

### Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak tetap

Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling dan lain-lain. (KBLI 2015).

### Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak tetap

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong dan lain-lain. (KBLI 2015).

### Konsumsi

Konsumsi bahan pokok dalam kajian ini mencakup bahan pokok yang digunakan untuk konsumsi langsung oleh manusia maupun konsumsi atau penggunaan yang dilakukan untuk selain manusia, misalnya untuk bahan baku industri pengolahan. Penghitungan konsumsi bahan pokok di rumah tangga mengacu pada konsep yang digunakan oleh Susenas. Dalam konsep Susenas, yang dimaksud dengan konsumsi adalah makanan atau bahan makanan yang benar-benar dikonsumsi oleh anggota rumah tangga. Sebagai contoh, konsumsi beras untuk keperluan pesta tidak dicatat pada rumah tangga yang mengadakan pesta tetapi dicatat sebagai konsumsi makanan jadi pada rumah tangga yang datang ke pesta dan mengkonsumsinya. Konsumsi pada Susenas tidak mencakup komoditas yang sudah dimasak atau diolah namun tidak dikonsumsi oleh anggota rumah tangga tersebut karena basi atau terbuang. Sementara itu, konsep konsumsi atau penggunaan pada Industri pengolahan dan usaha penyedia makan minum merujuk pada input/penggunaan komoditas untuk sektor tersebut.

### **Bahan Pangan Pokok**

Bahan pangan pokok yang dihitung konsumsinya terdiri dari;

- f. Beras, meliputi beras. Dalam penyajian penghitungan disebutkan sebagai beras.
- g. Jagung, meliputi jagung basah dengan kulit/tanpa kulit, jagung kering tanpa kulit, jagung pipilan (basah/kering), beras jagung, dan tepung jagung/maizena. Dalam penyajian penghitungan disetarakan ke bentuk jagung pipilan kering, kecuali untuk sektor industri besar dan sedang tahun 2019 konsumsi jagung dibedakan menurut jagung kering, dan jagung lainnya.
- h. **Daging sapi dan daging kerbau**, meliputi daging sapi dan daging kerbau segar, daging sapi dan daging kerbau beku, tetelan sapi dan kerbau, dan daging dengan tulang iga. Dalam penyajian penghitungan disetarakan ke bentuk **daging segar**.
- i. **Daging ayam**, meliputi daging ayam ras (ayam potong), daging ayam buras (ayam kampung), tetapi tidak termasuk jeroan.
- j. Telur ayam ras dan telur bebek/itik, meliputi telur ayam ras dan telur bebek atau itik, tetapi tidak termasuk telur ayam buras (telur ayam kampung).
- k. **Ikan segar dan hewan air lainnya,** meliputi ikan tuna/tongkol/cakalang, ikan kembung, ikan bandeng, ikan lainnya, dan hewan air selain ikan, tetapi tidak termasuk rumput laut.

### Industri Manufaktur

Industri Manufaktur merupakan kegiatan produksi yang mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Perusahaan/Usaha Industri Manufaktur adalah unit kegiatan ekonomi yang melakukan/mengusahakan industri manufaktur, terletak pada suatu bangunan/lokasi tertentu serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Industri manufaktur yang dicakup adalah industri dengan KBLI 2 digit, meliputi digit:

10 = Industri makanan

11 = Industri minuman

20 = Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia

21 = Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional

BPS mengklasifikasikan perusahaan/usaha industri manufaktur di Indonesia ke dalam 4 (empat) skala usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja/pekerja pada suatu perusahaan/usaha. Skala usaha tersebut adalah seperti berikut:

Industri Besar : perusahaan/usaha industri manufaktur yang mempunyai pekerja 100 orang

atau lebih.

Industri Sedang : perusahaan/usaha industri manufaktur yang mempunyai pekerja 20-99

orang.

Industri Kecil : perusahaan/usaha industri manufaktur yang mempunyai pekerja 5-19 orang.

Industri Mikro : perusahaan/usaha industri manufaktur yang mempunyai pekerja 1-4 orang.

### Jasa Kesehatan

Jasa Kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, rumah sakit bersalin, rumah bersalin, dan puskesmas yang menyediakan tempat menginap. Dalam kajian sebelumnya yang dicakup adalah rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, rumah sakit bersalin, dan rumah bersalin. Namun untuk tahun 2019 dengan keterbatasan data yang tersedia, konsumsi bahan pokok tahun 2019 masih menggunakan angka konsumsi tahun 2017.

### Jasa Lainnya

Jasa Lainnya yang mengkonsumsi bahan pokok adalah jasa hiburan, lembaga pemasyarakatan (LP), panti asuhan, panti jompo atau panti-panti lainnya. Kegiatan LP hanya oleh pemerintah, tetapi panti-panti

dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Namun dalam Kajian Konsumsi Bahan Pokok Tahun 2017, jasa lainnya tidak dicakup. Angka konsumsi bahan pokok tahun 2017 dan 2019 masih menggubnakan angka yang sama dengan tahun 2015.

### 2.8 Metode Perkiraan Konversi Bahan Pokok

### 2.8.1 Metode Perkiraan Konversi Berbagai Bentuk Jagung kedalam Jagung Pipilan

Bentuk Jagung	Jagung berkulit basah	Jagung berkulit kering	Jagung ontongan basah (tanpa kulit dan tangkai)	Jagung lepas kulit kering	Jagung pipilan kering	Jagung berasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jagung berkulit basah	100,00					
Jagung berkulit kering	75,00	100,00		10		
Jagung ontongan basah (tanpa kulit dan tangkai)	68,70	91,70	100,00			
Jagung lepas kulit kering	60,00	80,00	87,30	100,00		
Jagung pipilan kering	39,00	52,00	56,73	65,00	100,00	
Jagung berasan	36,00	48,00	52,40	60,00	93,00	100,00

Penghitungan konsumsi jagung pada kajian ini merujuk pada bentuk jagung pipilan kering.Untuk memperkirakan konsumsi jagung pipilan kering yang berasal dari penggunaan bentuk lain seperti jagung basah berkulit, jagung basah tidak berkulit, jagung berasan dan tepung jagung/maizena dilakukan penyetaraan dengan menggunakan angka konversi. Angka konversi yang digunakan dalam kajian ini dikutip dari Buku Pedoman Neraca Bahan Makanan (NBM), Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Dari Buku Pedoman NBM tersebut diperoleh angka konversi seperti tabel diatas.

### 2.8.2 Metode Perkiraan Konversi Daging Sapi dan Kerbau

Penghitungan konsumsi daging sapi dan kerbau pada kajian ini merujuk pada bentuk daging sapi dan kerbau tanpa tulang. Untuk memperkirakan konsumsi daging sapi dan kerbau tanpa tulang yang berasal dari penggunaan bentuk lain seperti tetelan dan tulang iga sapi dan kerbau dilakukan penyetaraan dengan menggunakan angka konversi. Berdasarkan studi dari Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertaniandalam "Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan", diperoleh angka konversi dari tetelan dan tulang iga sapid an kerbau ke daging sapi tanpa tulang masing-masing sebesar 0,20 dan 0,05. Artinya

### **METODOLOGI**

setiap 1 kg tetelan dan tulang iga sapi dan kerbau secara rata-rata akan menghasilkan daging sapi dan kerbau tanpa tulang masing-masing adalah 0,20 kg dan 0,05 kg.

### 2.8.3 Metode Perkiraan Konversi Telur

Penghitungan konsumsi telur pada kajian ini merujuk pada satuan kilogram (kg), sementara data hasil susenas menggunakan satuan butir. Untuk memperkirakan besaran konsumsi telur yang berasal dari susenas dilakukan penyetaraan dengan menggunakan angka konversi. Berdasarkan studi dari Direktur Jenderal Peternakan diperoleh angka konversi telur dari satuan butir menjadi kilogram (kg) sebanyak 16,096 butir telur ayam ras atau 13,974 butir telur bebek/itik. Artinya setiap 1 kg telur secara rata-rata akan berisi sebanyak 16,096 butir telur ayam ras atau 13,974 butir telur bebek/itik.

NitiPS: Ilwww.bpS.90:id

# PEMBAHASAN PEMBAHASAN

NitiPS: Ilwww.bpS.90:id

Kebutuhan akan bahan pokok makanan masih merupakan kebutuhan yang krusial dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Baik masyarakat lapisan atas, menengah, maupun lapisan bawah. Bahan pokok makanan merupakan kebutuhan utama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia karena bisa membantu dalam mendapatkan energi agar dapat menjalani kehidupan. Bahan pokok makanan ini biasanya disebut dengan konsep empat sehat lima sempurna, meliputi bahan pangan pokok (berupa beras, jagung, ubi, dan lain-lain), lauk pauk (berupa daging, ikan, telur, tahu, dan tempe), sayuran, buah dan susu. Namun tidak semua masyarakat bisa mengkonsumsi semua yang disebut dengan empat sehat lima sempurna tersebut. Hal itu tergantung pada kemauan atau kemampuan masyarakat. Jumlah dan jenis bahan pokok makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat tergantung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah jumlah produksi dan ketersediaan pangan. Pertambahan jumlah penduduk juga ikut berperan pada peningkatan permintaan bahan pokok makanan, sehingga tingkat konsumsi bahan pokok makanan ikut meningkat. Jika kenaikan permintaan bahan pokok makanan tidak diimbangi dengan kenaikan produksi bahan pokok makanan tersebut, maka akan berakibat pada terganggunya pemenuhan kebutuhan masyarakat

Untuk mengetahui kebutuhan bahan pokok makanan di masyarakat, maka pada publikasi Konsumsi Bahan Pokok 2019 ini diharapkan dapat memberikan data/informasi mengenai tingkat konsumsi bahan pokok makanan. Pembahasan konsumsi berbagai bahan pokok makanan dibawah ini adalah konsumsi bahan pokok pada rumah tangga, dan di luar rumah tangga. Konsumsi bahan pokok yang diteliti adalah beras, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam dan telur bebek/itik, ikan, dan jagung.

### 3.1 Konsumsi Beras

Keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia masih membutuhkan bahan pokok makanan, khususnya beras. Meskipun di sebagian kecil kalangan masyarakat menengah ke atas mungkin sudah mulai mengurangi konsumsi beras dan bergeser pola konsumsinya dari nasi mengarah ke roti atau vegetarian, namun sampai saat ini beras masih menjadi komoditas nomor satu untuk urusan kehidupan. Dapat pula dikatakan bahwa beras tidak bisa digantikan oleh jenis komoditas lain. Beras merupakan salah satu bahan pokok makanan yang selalu muncul dalam menu sehari-hari masyarakat Indonesia. Beras merupakan sumber energi terbesar bagi pertumbuhan tubuh karena mengandung sumber kalori dan protein yang utama.

Kondisi seperti ini membuat komoditi beras mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kestabilan perekonomian nasional. Beras juga mempunyai peranan strategis dalam ketahanan pangan,

ketahanan ekonomi, dan stabilitas politik nasional. Sebagian besar penduduk Indonesia menghendaki agar pasokan dan harga beras dapat stabil, tersedia sepanjang waktu serta dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu pemerintah selalu bertekad untuk mencapai swasembada beras dengan tingkat harga yang dapat terjangkau masyarakat. Untuk itu dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, pemerintah membuat berbagai kebijakan. Kebijakan pemerintah seperti pembelian gabah petani saat panen raya dan penetapan harga dasar gabah serta pengendalian harga di tingkat konsumen merupakan salah satu upaya agar masyarakat dapat mengkonsumsi beras dengan layak. Kebijakan lainnya yaitu program penyaluran beras bagi keluarga tidak mampu atau dikenal dengan program RASKIN/RASTRA.

Sampai saat ini konsumsi beras masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Hal ini adalah suatu kondisi yang wajar bahwa makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi, dan sebagian besar dikonsumsi dari rumah. Terlihat bahwa konsumsi beras pada rumah tangga di tahun 2019 adalah 20.685.619 ton, sekitar 77,5 kg per kapita per tahun. Kondisi ini cenderung mengalami penurunan, dimana konsumsi beras yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga dengan konsumsi per kapita nya juga mengalami penurunan.

Konsumsi beras pada usaha pariwisata yaitu usaha jasa akomodasi sebesar 23,41 juta ton. Seperti halnya konsumsi beras di rumah tangga, konsumsi beras di usaha jasa akomodasi (hotel) juga mengalami penurunan dibanding tahun 2017, dimana tahun 2017 sebesar 28,96 juta ton. Sementara konsumsi beras pada usaha penyedia makan minum (PMM) yang berskala menengah besar sebesar 79,65 juta ton beras, dan usaha penyedia makan minum (PMM) berskala mikro kecil 6.401,92 juta ton beras. Untuk konsumsi beras pada usaha PMM yang berskala UMB di tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2017, sedangkan pada usaha PMM berskala mikro kecil mengalami kenaikan. Sementara konsumsi beras di industri pengolahan mengalami penurunan.

Tabel 3.1 Konsumsi Beras menurut Institusi Pengguna, 2011-2019

	20:	11	20	12	2014		
Institusi	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Rumah tangga	21 659 173	90,1	21 345 465	87,63	21 378 122	85,04	
INDUSTRI	245 363	1,02	2 004 795	8,23	2 121 418	8,44	
Industri Besar Sedang	114 438	0,48	130 587	0,54	178 173	0,71	
Industri Mikro Kecil	130 925	0,54	1 874 208	7,69	1 943 245	7,73	
HOREKA	4 983 305	20,73	4 567 070	18,75	4 929 080	19,61	
Hotel	23 118	0,1	26 009	0,11	25 098	0,1	
Restoran dan Catering	29 073	0,12	30 235	0,12	47 155	0,19	
Rumah makan dan PMM Lainnya	4 931 114	20,51	4 510 826	18,52	4 856 827	19,32	
JASA	449 517	1,87	44 542	0,19	263 486	1,05	
Jasa Kesehatan	346 152	1,44	11 588	0,05	24 129	0,1	
Jasa Lainnya	103 365	0,43	32 954	0,14	239 357	0,95	
Total	27 337 358	113,72	27 961 872	114,8	28 692 107	114,13	

	20	15	09 2	2017	20	19
Institusi	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah tangga	21 614 072	84,9	21 307 828	81,61	20 685 619	77,50
INDUSTRI	2 574 232	10,11	2 029 043	7,77	465 835	1,75
Industri Besar Sedang	82 203	0,32	86 396	0,33	163 807	0,61
Industri Mikro Kecil	2 492 029	9,79	1 942 647	7,44	302 028	1,13
HOREKA	4 766 233	18,72	5 762 983	22,08	6 504 978	24,37
Hotel	25 224	0,1	28 962	0,11	23 406	0,09
Restoran dan Catering	34 860	0,14	90 309	0,35	79 654 <sup>1)</sup>	0,30
Rumah makan dan PMM Lainnya	4 706 149	18,48	5 643 712	21,62	6 401 918 <sup>2)</sup>	23,99
JASA	224 402	0,89	33 660	0,13	33 660	0,13
Jasa Kesehatan	93 069	0,37	33 660	0,13	33 660 <sup>3)</sup>	0,13
Jasa Lainnya	131 333	0,52				
Total	29 178 940	114,61	29 133 514	111,59	28 692 107	103,74

Keterangan

Tabel 3.2 menunjukkan konsumsi beras pada rumah tangga dan diluar rumah tangga per provinsi yang terdiri atas konsumsi beras pada usaha hotel, usaha penyedia makan minum, dan ondustri pengolahan yang pengkategoriannya sudah dibahas didepan. Sebagai informasi bahwa ada yang perlu diperhatikan dalam membandingkan konsumsi beras diluar rumah tangga pada level provinsi Pada tahun 2019 dengan tahun 2017. Di tahun 2017 konsumsi beras diluar rumah tangga merupakan konsumsi untuk

<sup>1)</sup> Hasil Survei VREST20\_ UMB

<sup>2)</sup> Hasil Survei VREST20\_UMK

<sup>3)</sup> Asumsi sama dengan tahun 2017

semua usaha cakupan. Sementara konsumsi beras tahun 2019 diluar rumah tangga merupakan konsumsi hotel, usaha penyedia makan minum skala menengah dan besar, industri besar dan sedang. Sesangkan untuk usaha penyedia makan minum skala mikro dan kecil dan industri pengolahan hanya bisa disajikan pada level nasional..

Di tahun 2017 dan tahun sebelumnya jika dilihat menurut provinsi ada 3 provinsi dengan konsumsi beras terbanyak yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 3.882,77 ribu ton, Provinsi Jawa Timur sebesar 2.967,95 ribu ton, dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 2.349,51 ribu ton. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing provinsi tersebut. Sementara provinsi dengan konsumsi beras terkecil adalah Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Maluku Utara, masing-masing sebesar 53,70 ribu ton, 69,30 ribu ton, dan 92,41 ribu ton. Pencapaian konsumsi yang tinggi di masing-masing provinsi adalah akibat konsumsi beras di rumah tangga yang tinggi.

Untuk konsumsi diluar rumah tangga, konsumsi beras tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur dengan konsumsi sebesar 87,95 ribu ton, disusul oleh Provinsi Sumatera Utara dengan konsumsi 45,80 ribu ton, dan Provinsi Jawa Barat dengan konsumsi sebesar 30,77 ribu ton.

Berdasarkan konsumsi per kapita tahun 2019, provinsi dengan konsumsi beras per kapita per tahun tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 101,32 kilogram per kapita per tahun, kemudian Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 101,32 kilogram per kapita per tahun akibat masih tingginya konsumsi di dalam rumah tangga, dan selanjutnya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 96,88 kilogram per kapita per tahun. Sementara konsumsi per kapita terendah adalah Provinsi Papua 54,61 kilogram per kapita per tahun, DIY 60,77 kilogram per kapita per tahun, dan Provinsi Kepulauan Riau 62,93 kilogram per kapita per tahun.

Tabel 3.2 Total Konsumsi Beras per Tahun Menurut Provinsi (ribu ton), 2017 dan 2019

		2017			2019	
Provinsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP) <sup>1)</sup>	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga <sup>2)</sup>	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	475,85	176,52	652,37	460,81	1,24	462,05
Sumatera Utara	1 315,30	316,08	1 631,38	1 270,29	45,80	1 316,09
Sumatera Barat	468,88	182,08	650,96	444,30	2,01	446,30
Riau	521,06	94,68	615,74	510,29	2,10	512,39
Jambi	286,61	41,44	328,05	273,60	0,63	274,22
Sumatera Selatan	694,40	117,14	811,54	689,14	4,53	693,68
Bengkulu	177,65	18,15	195,81	176,03	2,26	178,29
Lampung	684,21	78,39	762,59	658,29	1,41	659,70
Kep. Bangka Belitung	115,60	30,26	145,86	112,84	0,37	113,21
Kepulauan Riau	135,87	53,23	189,10	138,89	2,17	141,06
DKI Jakarta	676,88	551,37	1 228,25	689,14	25,83	714,97
Jawa Barat	3 963,46	2 183,59	6 147,05	3 852,00	30,77	3 882,77
Jawa Tengah	2 471,62	1 214,84	3 686,47	2 334,86	14,66	2 349,51
DI Yogyakarta	259,40	158,10	417,50	233,00	2,10	235,10
Jawa Timur	2 995,20	1 277,70	4 272,90	2 880,00	87,95	2 967,95
Banten	1 031,16	256,90	1 288,06	1 018,29	19,64	1 037,93
Bali	394,68	131,79	526,47	385,39	5,27	390,66
Nusa Tenggara Barat	499,20	106,74	605,94	497,86	1,32	499,18
Nusa Tenggara Timur	566,84	65,32	632,15	550,29	0,62	550,91
Kalimantan Barat	429,00	50,73	479,74	420,90	2,93	423,83
Kalimantan Tengah	216,04	38,01	254,05	214,20	0,43	214,64
Kalimantan Selatan	334,17	118,22	452,39	322,92	2,25	325,18
Kalimantan Timur	244,07	75,28	319,35	248,01	2,69	250,71
Kalimantan Utara	51,67	8,98	60,65	53,62	0,08	53,70
Sulawesi Utara	224,84	43,14	267,98	224,15	0,68	224,83
Sulawesi Tengah	284,24	70,64	354,88	268,84	0,41	269,25
Sulawesi Selatan	809,07	139,11	948,18	786,86	3,05	789,91
Sulawesi Tenggara	254,54	52,69	307,23	248,88	0,58	249,45
Gorontalo	104,18	28,35	132,53	106,82	0,18	107,00
Sulawesi Barat	142,01	25,45	167,46	138,06	0,22	138,28
Maluku	130,12	58,83	188,95	134,83	0,41	135,23
Maluku Utara	87,04	18,85	105,90	90,97	1,44	92,41
Papua Barat	68,50	20,15	88,65	69,08	0,22	69,30
Papua	194,45	22,95	217,40	182,20	0,59	182,79
Total	21 307,83	7 825,69	29 133,51	20 685,62	266,87	20 952,49
Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK					6 703,95	6 703,95
Indonesia	21 307,83	7 825,69	29 133,51	20 685,62	6 970,81	27 656,43

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hotel, Usaha PMM, Industri Pengolahan, dan Jasa Kesehatan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tidak termasuk Jasa Kesehatan

Tabel 3.3 Konsumsi Beras per Kapita per Tahun Menurut Provinsi (kg), 2017 dan 2019

		2017			2019	
Provinsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP) <sup>1)</sup>	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga <sup>2)</sup>	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	92,11	34,17	126,28	86,68	0,23	86,91
Sumatera Utara	92,48	22,22	114,71	86,77	3,13	89,90
Sumatera Barat	88,37	34,32	122,69	81,08	0,37	81,45
Riau	78,73	14,31	93,04	74,66	0,31	74,96
Jambi	81,87	11,84	93,70	76,72	0,18	76,89
Sumatera Selatan	84,27	14,22	98,48	81,10	0,53	81,64
Bengkulu	92,20	9,42	101,62	89,27	1,15	90,42
Lampung	82,75	9,48	92,23	77,83	0,17	78,00
Kep. Bangka Belitung	81,20	21,26	102,46	77,76	0,26	78,02
Kepulauan Riau	65,67	25,73	91,40	61,96	0,97	62,93
DKI Jakarta	65,40	53,27	118,67	65,61	2,46	68,07
Jawa Barat	82,79	45,61	128,40	78,58	0,63	79,20
Jawa Tengah	72,27	35,52	107,80	67,57	0,42	68,00
DI Yogyakarta	69,14	42,14	111,28	60,23	0,54	60,77
Jawa Timur	76,33	32,56	108,90	72,46	2,21	74,68
Banten	83,25	20,74	103,99	80,09	1,54	81,63
Bali	93,20	31,12	124,32	88,35	1,21	89,56
Nusa Tenggara Barat	101,04	21,60	122,64	96,63	0,26	96,88
Nusa Tenggara Timur	107,64	12,40	120,04	101,21	0,11	101,32
Kalimantan Barat	87,29	10,32	97,61	83,42	0,58	84,00
Kalimantan Tengah	83,37	14,67	98,04	80,84	0,16	81,00
Kalimantan Selatan	81,43	28,81	110,24	76,59	0,53	77,12
Kalimantan Timur	68,62	21,17	89,79	68,52	0,74	69,26
Kalimantan Utara	75,46	13,12	88,57	77,08	0,12	77,20
Sulawesi Utara	91,59	17,57	109,16	89,87	0,27	90,14
Sulawesi Tengah	96,19	23,90	120,09	88,37	0,14	88,51
Sulawesi Selatan	93,33	16,05	109,37	89,22	0,35	89,56
Sulawesi Tenggara	98,30	20,35	118,65	93,43	0,22	93,65
Gorontalo	89,51	24,36	113,87	90,80	0,16	90,96
Sulawesi Barat	107,19	19,21	126,40	101,58	0,16	101,73
Maluku	74,90	33,86	108,76	76,24	0,23	76,47
Maluku Utara	72,33	15,67	88,00	73,61	1,17	74,78
Papua Barat	75,29	22,14	97,43	71,69	0,23	71,91
Papua	59,82	7,06	66,88	54,44	0,18	54,61
Total	81,61	29,97	111,58	77,50	1,00	78,50
Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK					25,12	25,12
Indonesia	81,61	29,97	111,58	77,50	26,12	103,62

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hotel, Usaha PMM, Industri Pengolahan, dan Jasa Kesehatan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tidak termasuk Jasa Kesehatan

### 3.2 Konsumsi Daging Sapi dan Kerbau

Daging sapi dan kerbau merupakan sumber protein hewani yang sangat penting untuk kecukupan gizi masyarakat. Tingkat konsumsi hasil daging sapi dan kerbau akan menentukan kualitas sumber daya manusia. Sementara konsumsi daging sapi dipengaruhi oleh ketersediaan dan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi daya beli terhadap sumber protein dari ternak tersebut.

Konsumsi daging sapi dan kerbau tahun 2019 mencapai sekitar 782,40 ribu ton, atau sekitar 2,93 kilogram per kapita per tahun. Jika dibandingkan dengan hasil kajian bahan pokok tahun 2017, konsumsi daging sapi mengalami peningkatan sebesar 11 persen dalam kurun waktu 2 tahun. Dan peningkatan konsumsi per kapita sebesar 0,23 kg per kapita per tahun.

Kebutuhan/konsumsi daging sapi dan kerbau sebagian besar dilakukan di Horeka (hotel, restoran dan katering), yaitu sekitar 74,97 persen dari total kebutuhan atau konsumsi daging sapi dan kerbau di Indonesia. Sementara kebutuhan daging sapi dan kerbau yang dimasak di rumah tangga hanya sekitar 17,58 persen. Sisanya merupakan konsumsi industri pengolahan. Penggunaan daging sapi dan kerbau di hampir semua institusi mengalami peningkatan, kecuali pada industry mikro kecil yang mengalami penurunan.

Tabel 3.4 Konsumsi Daging Sapi dan Kerbau menurut Institusi Pengguna, 2014 – 2019

	20	14*)	201	5 <sup>*)</sup>	201	L7	2	019	
Institusi	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)		Per Kapita (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)		(8)
Rumah tangga	69 912	0,28	102 941	0,4	119 848	0,46	137 577		0,52
INDUSTRI	19 338	0,08	23 643	0,09	37 378	0,15	43 963		0,16
Industri Besar Sedang	4 100	0,02	10 449	0,04	12 211	0,05	32 313		0,121
Industri Mikro Kecil	15 238	0,06	13 194	0,05	25 167	0,1	11 650	*	0,044
HOREKA	510 863	2,03	443 790	1,74	541 512	2,08	586 576		2,20
Hotel	4 658	0,02	5 048	0,02	6 049	0,02	8 810		0,03
Restoran dan Catering	7 458	0,03	5 665	0,02	27 548	0,11	29 267	1)	0,11
Rumah makan dan PMM Lainnya	498 747	1,98	433 077	1,7	507 915	1,95	548 499	2)	2,05
JASA	32 263	0,13	17 374	0,07	6 118	0,02	6 118		0,02
Jasa Kesehatan	10 369	0,04	9 213	0,04	6 118	0,02	6 118	3)	0,023
Jasa Lainnya	21 894	0,09	8 161	0,03					
Total	632 413	2,52	587 747	2,31	704 855	2,70	774 234		2,90

<sup>\*) :</sup> hanya data daging sapi

<sup>1)</sup> Hasil Survei VREST20\_ UMB

<sup>2)</sup> Hasil Survei VREST20\_UMK

<sup>3)</sup> Asumsi sama dengan tahun 2017

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki total konsumsi daging sapi dan kerbau terbesar selama tahun 2019 dibandingkan provinsi lain, yaitu mencapai sekitar 46,51 ribu ton. Provinsi berikutnya dengan konsumsi daging sapi dan kerbau terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur sebesar 42,45 ribu ton dan DKI Jakarta sebesar 41,15 ribu ton. Konsumsi daging sapi dan kerbau yang cukup tinggi dari ketiga provinsi tersebut disebabkan oleh tingginya konsumsi daging sapi dan kerbau di dalam rumah tangga. Sedangkan konsumsi daging sapi dan kerbau yang masih rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Kaimantan Utara yang masing-masing sebesar 0,115 ribu ton; 0,121 ribu ton; dan 0,220 ribu ton. Berbicara mengenai konsumsi daging sapi dan kerbau pada level provinsi diatas merupakan konsumsi diluar usaha penyedia makan minum skala mikro dan kecil, dan industri pengolahan mikro dan kecil.

Sementara itu, konsumsi daging sapi dan kerbau per kapita tahun 2019 yang tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai sekitar 3,92 kg per kapita per tahun. Selanjutnya adalah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Timur yang masing-masing sebesar 1,35 kg per kapita per tahun, dan 1,11 kg per kapita per tahun.

Tabel 3.5 Total Konsumsi Daging Sapi dan Kerbau Menurut Provinsi (ton), 2017 dan 2019

		2017			2019			
Provinsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP) <sup>1)</sup>	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga <sup>2)</sup>	Total Konsumsi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
Aceh	1 293	4 279	5 572	1 187,08	216,98	1 404,07		
Sumatera Utara	2 454	7 738	10 193	2 997,05	339,47	3 336,52		
Sumatera Barat	3 214	13 729	16 943	3 229,17	664,40	3 893,57		
Riau	1 876	6 297	8 173	1 913,04	676,16	2 589,21		
Jambi	1 158	4 252	5 410	1 166,62	82,94	1 249,56		
Sumatera Selatan	2 355	9 697	12 052	2 815,50	773,84	3 589,34		
Bengkulu	626	2 132	2 758	849,18	9,07	858,24		
Lampung	1 969	20 762	22 731	1 573,21	202,06	1 775,26		
Kep. Bangka Belitung	589	2 615	3 204	658,04	83,41	741,45		
Kep. Riau	1 440	2 883	4 323	1 546,89	570,92	2 117,82		
DKI Jakarta	15 498	50 866	66 364	23 396,39	17 752,77	41 149,15		
Jawa Barat	28 812	140 018	168 830	31 914,99	14 592,34	46 507,33		
Jawa Tengah	7 201	78 883	86 084	9 113,33	2 809,83	11 923,15		
DI Yogyakarta	997	9 982	10 979	1 933,73	1 715,38	3 649,12		
Jawa Timur	27 125	108 617	135 742	28 539,54	13 911,60	42 451,13		
Banten	6 783	33 485	40 268	8 957,69	8 164,93	17 122,62		
Bali	772	9 243	10 015	895,62	3 945,85	4 841,47		
Nusa Tenggara Barat	3 115	18 714	21 829	3 776,88	200,81	3 977,69		
Nusa Tenggara Timur	3 087	4 482	7 568	2 093,66	203,82	2 297,48		
Kalimantan Barat	790	3 986	4 775	1 259,86	644,48	1 904,34		
Kalimantan Tengah	490	4 602	5 092	657,43	51,59	709,02		
Kalimantan Selatan	702	5 889	6 591	953,80	292,24	1 246,04		
Kalimantan Timur	1 639	8 517	10 156	1 387,94	544,45	1 932,39		
Kalimantan Utara	210	1 016	1 226	199,89	20,48	220,38		
Sulawesi Utara	397	1 972	2 369	392,80	344,29	737,09		
Sulawesi Tengah	595	2 656	3 251	515,09	33,97	549,06		
Sulawesi Selatan	2 272	17 085	19 357	1 647,42	926,32	2 573,75		
Sulawesi Tenggara	430	2 361	2 790	432,69	101,77	534,46		
Gorontalo	315	1 268	1 583	308,65	14,28	322,92		
Sulawesi Barat	112	1 050	1 162	100,84	14,54	115,38		
Maluku	274	1 046	1 321	234,79	51,82	286,61		
Maluku Utara	139	1 241	1 380	126,62	177,52	304,14		
Papua Barat	150	1 562	1 713	97,21	24,04	121,25		
Papua	968	2 084	3 051	704,71	231,02	935,74		
Total	119 848	585 007	704 855	137 577,35	70 389,38	207 966,74		
Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK					560 149,31	560 149,31		
Indonesia	119 848	585 007	704 855	137 577,35	630 538,69	768 116,04		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hotel, Usaha PMM, Industri Pengolahan, dan Jasa Kesehatan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tidak termasuk Jasa Kesehatan

Tabel 3.6 Konsumsi Daging Sapi dan Kerbau per Kapita per Tahun Menurut Provinsi (kg), 2017 dan 2019

		2017			2019	
Provinsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP) <sup>1)</sup>	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga <sup>2)</sup>	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,25	0,83	1,08	0,22	0,04	0,26
Sumatera Utara	0,17	0,54	0,72	0,20	0,02	0,23
Sumatera Barat	0,61	2,59	3,19	0,59	0,12	0,71
Riau	0,28	0,95	1,23	0,28	0,10	0,38
Jambi	0,33	1,21	1,55	0,33	0,02	0,35
Sumatera Selatan	0,29	1,18	1,46	0,33	0,09	0,42
Bengkulu	0,32	1,11	1,43	0,43	0,00	0,44
Lampung	0,24	2,51	2,75	0,19	0,02	0,21
Kep. Bangka Belitung	0,41	1,84	2,25	0,45	0,06	0,51
Kep. Riau	0,70	1,39	2,09	0,69	0,25	0,94
DKI Jakarta	1,50	4,91	6,41	2,23	1,69	3,92
Jawa Barat	0,60	2,92	3,53	0,65	0,30	0,95
Jawa Tengah	0,21	2,31	2,52	0,26	0,08	0,35
DI Yogyakarta	0,27	2,66	2,93	0,50	0,44	0,94
Jawa Timur	0,69	2,77	3,46	0,72	0,35	1,07
Banten	0,55	2,70	3,25	0,70	0,64	1,35
Bali	0,18	2,18	2,36	0,21	0,90	1,11
Nusa Tenggara Barat	0,63	3,79	4,42	0,73	0,04	0,77
Nusa Tenggara Timur	0,59	0,85	1,44	0,39	0,04	0,42
Kalimantan Barat	0,16	0,81	0,97	0,25	0,13	0,38
Kalimantan Tengah	0,19	1,78	1,96	0,25	0,02	0,27
Kalimantan Selatan	0,17	1,44	1,61	0,23	0,07	0,30
Kalimantan Timur	0,46	2,39	2,86	0,38	0,15	0,53
Kalimantan Utara	0,31	1,48	1,79	0,29	0,03	0,32
Sulawesi Utara	0,16	0,80	0,96	0,16	0,14	0,30
Sulawesi Tengah	0,20	0,90	1,10	0,17	0,01	0,18
Sulawesi Selatan	0,26	1,97	2,23	0,19	0,11	0,29
Sulawesi Tenggara	0,17	0,91	1,08	0,16	0,04	0,20
Gorontalo	0,27	1,09	1,36	0,26	0,01	0,27
Sulawesi Barat	0,08	0,79	0,88	0,07	0,01	0,08
Maluku	0,16	0,60	0,76	0,13	0,03	0,16
Maluku Utara	0,12	1,03	1,15	0,10	0,14	0,25
Papua Barat	0,17	1,72	1,88	0,10	0,02	0,13
Papua	0,30	0,64	0,94	0,21	0,07	0,28
Total	0,46	2,24	2,70	0,52	0,26	0,78
Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK					2,10	2,10
Indonesia	0,46	2,24	2,70	0,52	2,36	2,88

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hotel, Usaha PMM, Industri Pengolahan, dan Jasa Kesehatan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tidak termasuk Jasa Kesehatan

# 3.3 Konsumsi Daging Ayam

Asupan gizi berkualitas menjadi salah satu kunci masyarakat dapat menikmati hidup sehat, salah satunya yaitu melalui konsumsi protein. Protein ini yang penting untuk kesehatan seperti daging ayam yang merupakan salah satu sumber protein hewani. Penduduk Indonesia sebagian besar menyukai daging ayam karena beberapa alasan. Selain rasanya enak dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan daging sapi, daging ayam juga mengandung kolesterol yang lebih rendah. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dan mayoritas menyukai daging ayam ini merupakan potensi bagi industri hilir makanan olahan, termasuk restoran, rumah makan dan penyedia makan minum lainnya yang menyajikan masakan cepat saji berbahan dasar ayam.

Semakin menjamurnya kuliner yang berbahan dasar daging ayam, dari warung pinggir jalan hingga di pusat perbelanjaan membuat konsumsi daging ayam mengalami tren kenaikan sepanjang 2014-2019 seperti terlihat pada dibawah. Tabel 3.7 menunjukkan bahwa penggunaan daging ayam sebagian besar dilakukan oleh usaha jasa penyedia makan minum, yaitu usaha rumah makan dan PMM lainnya. Konsumsi daging ayam yang mencapai 2,63 juta ton daging ayam atau sekitar 57,90 persen dari total konsumsi daging ayam di Indonesia pada tahun 2019.

Tabel 3.7 Konsumsi Daging Ayam menurut Institusi Pengguna, 2014 – 2019

	2014	1	201	5	201	.7		2019	
Institusi	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)		Per Kapita (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)		(8)
Rumah tangga	1 128 030	4,49	1 368 967	5,38	1 683 604	6,45	1 705 673		6,39
INDUSTRI	42 387	0,17	35 112	0,13	371 962	1,43	93 446		0,35
Industri Besar Sedang	30 007	0,12	8 835	0,03	314 736	1,21	73 013		0,27
Industri Mikro Kecil	12 380	0,05	26 277	0,1	57 226	0,22	20 433		0,08
HOREKA	2 021 233	8,04	1 955 954	7,68	1 870 511	7,17	2 727 699		10,22
Hotel	13 704	0,05	179 499	0,7	27 599	0,11	19 982		0,07
Restoran dan Catering	62 227	0,25	32 738	0,13	101 779	0,39	81 682	1)	0,31
Rumah makan dan PMM Lainnya	1 945 302	7,74	1 743 717	6,85	1 741 133	6,67	2 626 035	2)	9,84
JASA	13 940	0,05	13 955	0,06	7 678	0,03	7 678		0,029
Jasa Kesehatan	7 967	0,03	12 669	0,05	7 678	0,03	7 678	3)	0,029
Jasa Lainnya	5 973	0,02	1 286	0,01					
Total	3 205 590	12,75	3 373 987	13,25	3 933 756	15,07	4 534 496		16,99

<sup>1)</sup> Hasil Survei VREST20\_ UMB

<sup>2)</sup> Hasil Survei VREST20\_UMK

<sup>3)</sup> Asumsi sama dengan tahun 2017

Konsumsi daging ayam di dalam rumah tangga pada tahun 2019 mencapai sekitar 37,60 persen, sedangkan penggunaan daging ayam untuk usaha restoran dan katering sebesar 1,80 persen, serta usaha jasa akomodasi/hotel mencapai 0,44 persen. Dibandingkan dengan tahun 2017, terjadi peningkatan konsumsi daging ayam sekitar 15,27 persen pada tahun 2019. Kontribusi peningkatan terbesar disumbang dari konsumsi rumah makan dan PMM Lainnya yang menglami peningkatan konsumsi pada tahun 2019 sebesar 50,82 persen dari tahun 2017. Konsumsi daging ayam yang dicakup dalam publikasi ini meliputi ayam ras (ayam potong) dan ayam buras (ayam kampung), dimana penggunaan ayam ras lebih dominan dibandingkan ayam buras.

Sumber data konsumsi bahan pokok untuk usaha PMM Lainnya (UMK) adalah Survei Usaha Penyedia Makan Minum berskala mikro kecil, dimana hasil penghitungannya hanya dapat disajikan pada level nasional, termasuk konsumsi daging ayam. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa konsumsi daging ayam terbesar berada pada usaha PMM Lainnya dan penyajiannya pada tahun 2019 hanya pada level nasional, maka perlu kehati-hatian dalam membandingkan nilai konsumsi daging ayam per provinsi antara tahun 2017 dengan tahun 2019, terutama nilai pada kolom 3 (di luar rumah tangga VKBP) dengan kolom 6 (gabungan berbagai survei). Di kolom 3 merupakan konsumsi daging ayam diluar rumah tangga untuk usaha yang menjadi cakupan. Sementara di kolom 6 merupakan konsumsi daging diluar rumah tangga selain usaha penyedia makan minum skala mikro dan kecil, dan industry pengolahan skala mikro dan kecil, karena data tersebut hanya disajikan dalam level nasional.

Berdasarkan Tabel 3.8, pada tahun 2019 Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang memiliki total konsumsi terbesar dibandingkan provinsi lainnya dengan total konsumsi hampir mencapai 450 ribu ton daging ayam (diluar konsumsi daging ayam oleh usaha PMM Lainnya (UMK)). Provinsi terbesar kedua yang memiliki total konsumsi terbesar yaitu Provinsi Jawa Timur dengan total konsumsi mencapai 218 ribu ton daging ayam (diluar konsumsi daging ayam oleh usaha PMM Lainnya (UMK)). Provinsi dengan total konsumsi daging ayam terkecil pada tahun 2019 yaitu Provinsi Sulawesi Barat, dengan total konsumsi sebesar 3 ribu ton daging ayam (diluar konsumsi daging ayam oleh usaha PMM Lainnya (UMK)), dan Provinsi Maluku Utara 3,28 ribu ton.

Tabel 3.8 Total Konsumsi Daging Ayam per Tahun Menurut Provinsi (ton), 2017 dan 2019

		2017			2019	
Provinsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga <sup>2)</sup>	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	20 403	39 453	59 856	18 478	756	19 233
Sumatera Utara	73 650	97 485	171 136	87 081	2 633	89 714
Sumatera Barat	36 297	55 004	91 302	39 520	2 413	41 933
Riau	62 893	48 429	111 322	61 983	2 923	64 906
Jambi	28 795	19 030	47 825	29 103	555	29 658
Sumatera Selatan	61 294	45 694	106 988	58 283	2 237	60 520
Bengkulu	11 902	8 490	20 393	12 325	264	12 589
Lampung	45 599	39 940	85 539	43 011	2 094	45 105
Kep. Bangka Belitung	15 216	11 263	26 479	14 229	385	14 614
Kep. Riau	21 208	23 105	44 312	22 276	2 829	25 105
DKI Jakarta	96 160	186 839	282 999	99 775	25 236	125 011
Jawa Barat	392 874	398 443	791 318	392 808	56 846	449 654
Jawa Tengah	190 935	296 704	487 638	191 949	9 756	201 704
DI Yogyakarta	27 210	68 959	96 168	25 043	3 191	28 234
Jawa Timur	207 905	462 020	669 925	195 310	22 201	217 510
Banten	104 801	99 773	204 574	108 713	14 988	123 701
Bali	32 059	46 272	78 331	37 213	7 932	45 145
Nusa Tenggara Barat	20 775	34 440	55 214	25 804	799	26 603
Nusa Tenggara Timur	15 460	5 208	20 668	15 979	582	16 561
Kalimantan Barat	37 857	19 068	56 924	38 522	2 107	40 630
Kalimantan Tengah	26 155	27 479	53 633	24 965	585	25 549
Kalimantan Selatan	29 161	36 023	65 184	31 605	2 098	33 703
Kalimantan Timur	33 419	48 520	81 939	32 724	2 468	35 192
Kalimantan Utara	4 165	3 345	7 511	5 360	58	5 418
Sulawesi Utara	8 778	15 484	24 262	7 244	990	8 234
Sulawesi Tengah	7 071	12 383	19 453	7 139	439	7 577
Sulawesi Selatan	32 674	57 682	90 356	36 049	3 382	39 431
Sulawesi Tenggara	5 593	7 468	13 061	6 845	574	7 419
Gorontalo	3 895	4 043	7 939	3 853	213	4 066
Sulawesi Barat	2 061	5 524	7 585	2 728	275	3 003
Maluku	4 294	6 751	11 045	4 167	624	4 791
Maluku Utara	1 698	4 268	5 966	1 454	1 825	3 279
Papua Barat	3 298	5 129	8 426	3 434	74	3 509
Papua	18 052	10 433	28 485	20 701	349	21 051
Indonesia	1 683 604	2 250 152	3 933 756	1 705 673	174 678	1 880 351
Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK	_ 130 00 .		2 2 3 2 7 2 3	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2 646 468	2 646 468
Indonesia	1 683 604	2 250 152	3 933 756	1 705 673	2 821 145	4 526 818
muunesia	1 003 004	Z Z3U 13Z	3 333 /30	1 /05 0/3	2 021 143	4 240 019

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hotel, Usaha PMM, Industri Pengolahan, dan Jasa Kesehatan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tidak termasuk Jasa Kesehatan

Tabel 3.9 Konsumsi Daging Ayam per Kapita per Tahun Menurut Provinsi (kg), 2017 dan 2019

		2017			2019	
Provinsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga <sup>2)</sup>	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3,95	7,64	11,59	3,48	0,14	3,62
Sumatera Utara	5,18	6,85	12,03	5,95	0,18	6,13
Sumatera Barat	6,84	10,37	17,21	7,21	0,44	7,65
Riau	9,50	7,32	16,82	9,07	0,43	9,50
Jambi	8,22	5,44	13,66	8,16	0,16	8,32
Sumatera Selatan	7,44	5,55	12,98	6,86	0,26	7,12
Bengkulu	6,18	4,41	10,58	6,25	0,13	6,38
Lampung	5,51	4,83	10,35	5,09	0,25	5,33
Kep. Bangka Belitung	10,69	7,91	18,60	9,81	0,27	10,07
Kep. Riau	10,25	11,17	21,42	9,94	1,26	11,20
DKI Jakarta	9,29	18,05	27,34	9,50	2,40	11,90
Jawa Barat	8,21	8,32	16,53	8,01	1,16	9,17
Jawa Tengah	5,58	8,68	14,26	5,56	0,28	5,84
DI Yogyakarta	7,25	18,38	25,63	6,47	0,82	7,30
Jawa Timur	5,30	11,77	17,07	4,91	0,56	5,47
Banten	8,46	8,05	16,52	8,55	1,18	9,73
Bali	7,57	10,93	18,50	8,53	1,82	10,35
Nusa Tenggara Barat	4,20	6,97	11,18	5,01	0,16	5,16
Nusa Tenggara Timur	2,94	0,99	3,92	2,94	0,11	3,05
Kalimantan Barat	7,70	3,88	11,58	7,63	0,42	8,05
Kalimantan Tengah	10,09	10,60	20,70	9,42	0,22	9,64
Kalimantan Selatan	7,11	8,78	15,88	7,50	0,50	7,99
Kalimantan Timur	9,40	13,64	23,04	9,04	0,68	9,72
Kalimantan Utara	6,08	4,89	10,97	7,71	0,08	7,79
Sulawesi Utara	3,58	6,31	9,88	2,90	0,40	3,30
Sulawesi Tengah	2,39	4,19	6,58	2,35	0,14	2,49
Sulawesi Selatan	3,77	6,65	10,42	4,09	0,38	4,47
Sulawesi Tenggara	2,16	2,88	5,04	2,57	0,22	2,79
Gorontalo	3,35	3,47	6,82	3,28	0,18	3,46
Sulawesi Barat	1,56	4,17	5,73	2,01	0,20	2,21
Maluku	2,47	3,89	6,36	2,36	0,35	2,71
Maluku Utara	1,41	3,55	4,96	1,18	1,48	2,65
Papua Barat	3,62	5,64	9,26	3,56	0,08	3,64
Papua	5,55	3,21	8,76	6,18	0,10	6,29
Indonesia	6,45	8,62	15,07	6,39	0,65	7,04
Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK	,	· ·	, 		9,92	9,92
Indonesia	6,45	8,62	15,07	6,39	10,57	16,96
			×			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hotel, Usaha PMM, Industri Pengolahan, dan Jasa Kesehatan

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Tidak termasuk Jasa Kesehatan

Berdasarkan Tabel 3.9, nilai konsumsi per kapita tertinggi pada tahun 2019 berada di Provinsi DKI Jakarta, dengan konsumsi per kapita sebesar 11,90 Kg per kapita per tahun (diluar konsumsi daging ayam oleh usaha PMM Lainnya (UMK)). Konsumsi per kapita per tahun daging ayam dapat dijadikan sebagai acuan tingkat kebutuhan konsumsi daging ayam di suatu wilayah. Tingkat kebutuhan konsumsi daging ayam terbesar kedua berada di Provinsi Kepulauan Riau, dengan tingkat kebutuhan sebesar 11,20 Kg per kapita per tahun (diluar konsumsi daging ayam oleh usaha PMM Lainnya (UMK)). Sulawesi Barat merupakan provinsi yang memiliki tingkat kebutuhan konsumsi daging ayam terendah dibandingkan provinsi lainnya, dengan konsumsi per kapita sebesar 2,21 Kg per kapita per tahun (diluar konsumsi daging ayam oleh usaha PMM Lainnya (UMK). Dan selanjutnya adalah Sulawesi Tengah dengan konsumsi per kapita sebesar 2,49 kg per kapita per hari.

# 3.4 Konsumsi Telur Ayam Ras dan Telur Bebek/Itik

Telur merupakan salah satu komoditas peternakan yang banyak dipilih masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Telur menjadi makanan atau lauk yang primadona bagi masyarakat di Indonesia karena mudah diperoleh, cukup terjangkau, dan mudah untuk diolah. Sebutir telur terbagi atas putih dan kuning telur, dimana putih telur merupakan sumber protein hewani yang paling bagus sementara kuning telur adalah sumber lemak yang menyimpan banyak kolesterol. Telur yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah telur ayam ras dan telur bebek/itik.

Kebutuhan telur di Indonesia cukup tinggi, selain diolah langsung oleh rumah tangga untuk dikonsumsi sendiri juga banyak digunakan sebagai bahan baku pada industri pengolahan makanan jadi serta bahan baku usaha penyedia makanan dan minuman. Hal ini menyebabkan harga telur sering mengalami fluktuasi, terutama menjelang perayaan hari-hari besar seperti lebaran dan natal. Untungnya kebutuhan telur di Indonesia masih bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri atau sudah terjadi swasembada telur di Indonesia sehingga gejolak harga dapat segera diatasi. Terjadi peningkatan konsumsi telur di tahun 2019 dibanding tahun 2017, semula 4,81 juta ton menjadi 5,59 juta ton. Berarti terjadi peningkatan sebesar 16,10 persen. Sedangkan konsumsi per kapita meningkat dari 18,44 per kapita menjadi 20,94 per kapita.

Tabel 3.10 menunjukkan konsumsi telur ayam dan bebek/itik pada tahun 2017 dan 2019. Konsumsi telur ayam dan telur bebek pada tahun 2019 didominasi oleh usaha makan minum berskala mikro kecil yaitu sebanyak 3,57 juta ton, atau sekitar 13,39 per kapita per tahun. Konsumsi telur pada usaha makan minum berskala mikro kecil mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 1,43 juta ton. Sementara itu, konsumsi telur pada usaha makan minum berskala menengah besar mengalami

penurunan dibandingkan tahun 2017, yaitu dari 41.826 ton atau 0,16 kg per kapita per tahun menjadi 34.770 ton atau 0,13 per kapita per tahun pada tahun 2019.

Kebutuhan konsumsi telur selama 2019 di rumah tangga juga cukup tinggi, yaitu sebanyak 1,80 juta ton, atau sekitar 6,74 kg per kapita per tahun. Konsumsi telur di rumah tangga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017, dimana konsumsi pada tahun 2017 sebanyak 1,76 juta ton. Sementara itu, konsumsi telur pada usaha jasa akomodasi adalah sebanyak 22.346 ton atau 0,08 kg per kapita per tahun. Terdapat peningkatan dibandingkan dengan konsumsi tahun 2017 yang sebesar 27.882 ton.

Tabel 3.10 Konsumsi Telur Ayam dan Telur Bebek/Itik menurut Institusi Pengguna, 2017 dan 2019

	2017		2019		
Institusi	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)		Per Kapita (kg)
(1)	(2)	(3)	(3)		(5)
Rumah tangga	1 764 647	6,76	1 799 534		6,74
INDUSTRI	1 528 060	5,85	138 616		0,52
Industri Besar Sedang	45 256	0,17	25 801		0,10
Industri Mikro Kecil	1 482 804	5,68	112 815		0,42
HOREKA	1 500 819	5,75	3 630 585		13,60
Hotel	27 882	0,11	22 346		0,08
Restoran dan Catering	41 826	0,16	34 770	1)	0,13
Rumah makan dan PMM Lainnya	1 431 111	5,48	3 573 469	2)	13,39
JASA	20 754	0,08	20 754		0,08
Jasa Kesehatan	20 754	0,08	20 754	3)	0,08
Total	4 814 279	18,44	5 589 489		20,94

Keterangan

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki kebutuhan telur paling banyak dibandingkan dengan provinsi lain, selama tahun 2019 mencapai sekitar 408,55 ribu ton. Provinsi berikutnya dengan konsumsi telur ayam ras dan telur bebek terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur yaitu sekitar 251,06 ribu ton dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 229,53 ribu ton. Hal ini wajar mengingat banyaknya penduduk di ketiga provinsi tersebut. Sedangkan konsumsi telur ayam ras dan telur bebek yang terendah adalah di Provinsi Maluku Utara sebesar 3,36 ribu ton, Gorontalo sebesar 4,13 ribu ton, dan Papua Barat sebesar 4,43 ton. Konsumsi telur ayam ras dan telur bebek per kapita selama tahun 2019 yang tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta hingga mencapai 9,96 kg per kapita per tahun. Selanjutnya terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bali yang masing-masing mencapai sekitar 9,56 kg dan 8,71 kg per kapita per tahun. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan tingkat kebutuhan konsumsi telur ayam ras dan telur bebek paling rendah yaitu hanya sekitar 2,24 kg per kapita per tahun, selanjutnya Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku masing-masing hanya sebesar 2,72 kg dan 2,99 kg per kapita per tahun.

<sup>1)</sup> Hasil Survei VREST20 UMB

<sup>2)</sup> Hasil Survei VREST20\_UMK

<sup>3)</sup> Asumsi sama dengan tahun 2017

Seperti halnya komoditi sebelumnya, maka untuk konsumsi telur yang dibahas pada level provinsi adalah konsumsi telur diluar usaha penyedia makan minum skala mikro dan kecil, dan industri prngolahan skala mikro kecil.

Tabel 3.11 Konsumsi Telur Ayam dan Telur Bebek/Itik Menurut Provinsi (ton), 2017 dan 2019

		2017			2019	
Provinsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP) <sup>1)</sup>	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga <sup>2)</sup>	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	34 403	32 778	67 181	33 283,89	388,74	33 672,64
Sumatera Utara	94 659	112 258	206 917	100 790,22	3 653,73	104 443,96
Sumatera Barat	39 120	96 632	135 753	36 916,72	1 424,05	38 340,77
Riau	53 282	23 978	77 261	52 261,73	854,45	53 116,18
Jambi	23 695	12 626	36 321	23 424,10	861,61	24 285,72
Sumatera Selatan	67 169	28 443	95 611	63 300,11	1 986,30	65 286,41
Bengkulu	12 453	6 951	19 405	12 523,34	117,96	12 641,30
Lampung	62 718	20 651	83 369	61 323,94	648,17	61 972,11
Kep. Bangka Belitung	10 937	10 077	21 014	10 480,50	233,48	10 713,98
Kep. Riau	17 916	23 657	41 574	19 252,38	2 168,19	21 420,57
DKI Jakarta	81 350	162 836	244 187	86 873,14	17 734,94	104 608,08
Jawa Barat	379 219	273 668	652 887	393 100,61	15 452,51	408 553,12
Jawa Tengah	212 750	1 449 834	1 662 583	224 004,97	5 529,47	229 534,45
DI Yogyakarta	27 558	91 440	118 998	28 629,41	2 689,31	31 318,73
Jawa Timur	246 040	171 603	417 643	242 355,16	8 707,60	251 062,75
Banten	97 204	113 672	210 876	99 921,81	2 829,39	102 751,20
Bali	28 748	24 600	53 348	28 088,90	9 914,67	38 003,57
Nusa Tenggara Barat	26 611	26 838	53 448	30 545,09	1 104,91	31 650,00
Nusa Tenggara Timur	10 378	6 156	16 534	11 946,78	220,36	12 167,13
Kalimantan Barat	32 457	20 802	53 260	34 115,94	572,74	34 688,68
Kalimantan Tengah	19 311	52 963	72 274	19 485,11	223,71	19 708,82
Kalimantan Selatan	32 109	25 719	57 828	32 105,89	909,53	33 015,43
Kalimantan Timur	27 182	24 209	51 391	28 889,35	878,14	29 767,49
Kalimantan Utara	4 537	13 183	17 720	4 787,13	60,59	4 847,73
Sulawesi Utara	11 072	14 180	25 252	9 979,46	995,13	10 974,59
Sulawesi Tengah	11 241	21 906	33 146	11 264,21	117,43	11 381,65
Sulawesi Selatan	56 701	143 078	199 779	53 176,16	1 497,51	54 673,67
Sulawesi Tenggara	11 530	13 013	24 543	12 487,12	149,03	12 636,15
Gorontalo	3 887	6 465	10 352	4 071,61	57,64	4 129,26
Sulawesi Barat	4 799	3 213	8 011	5 291,56	81,62	5 373,18
Maluku	5 176	6 242	11 418	5 108,74	178,36	5 287,09
Maluku Utara	3 049	4 008	7 057	3 098,31	260,70	3 359,01
Papua Barat	3 751	4 466	8 216	4 276,35	158,57	4 434,92
Papua	11 636	7 485	19 121	12 374,22	256,13	12 630,34
Indonesia	1 764 647	3 049 633	4 814 280	799 533,98	82 916,68	882 450,66
Usaha PMM Skala	1707047	3 043 033	7 017 200	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
UMK + Industri IMK					686 283,88	686 283,88
Indonesia	1 764 647	3 049 633	4 814 280	799 533,98	769 200,56	568 734,54

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hotel, Usaha PMM, Industri Pengolahan, dan Jasa Kesehatan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tidak termasuk Jasa Kesehatan

Tabel 3.12 Konsumsi Telur Ayam dan Telur Bebek/Itik per Kapita per Tahun Menurut Provinsi (ton), 2017 dan 2019

Provinsi         Di Dalam Tangga (Susenas)         Di Luar Tangga (Susenas)         Total Tangga (Susenas)         Di Luar Tangga (Susenas)         Total Tangga (Susenas)			2017			2019	
Aceh         6,66         6,34         13,00         6,26         0,07         6,33           Sumatera Utara         6,66         7,89         14,55         6,88         0,25         7,13           Sumatera Barat         7,37         18,21         25,59         6,74         0,26         7,03           Riau         8,05         3,62         11,67         7,65         0,13         7,77           Jambi         6,77         3,61         10,37         6,57         0,24         6,81           Sumatera Selatan         8,15         3,45         11,60         7,45         0,23         7,68           Bengkulu         6,46         3,61         10,07         6,35         0,06         6,41           Lampung         7,59         2,50         10,08         7,25         0,08         7,33           Kep. Riau         8,66         11,43         20,09         8,59         0,97         9,56           DKI Jakarta         7,86         15,73         23,59         8,27         1,69         9,96           Jawa Tangah         6,22         42,40         48,62         6,48         0,16         6,64           DI Yogyakarta         7,35	Provinsi	Rumah Tangga	Rumah Tangga (VKBP) <sup>1)</sup>	Konsumsi	Rumah Tangga	Rumah Tangga <sup>2)</sup>	
Sumatera Utara         6,66         7,89         14,55         6,88         0,25         7,13           Sumatera Barat         7,37         18,21         25,59         6,74         0,26         7,00           Riau         8,05         3,62         11,67         7,65         0,13         7,77           Jambi         6,77         3,61         10,37         6,57         0,24         6,81           Sumatera Selatan         8,15         3,45         11,60         7,45         0,23         7,68           Bengkulu         6,46         3,61         10,07         6,35         0,06         6,41           Lampung         7,59         2,50         10,08         7,25         0,08         7,33           Kep. Briga Belitung         7,68         7,08         14,76         7,22         0,16         7,38           Kep. Riau         8,66         11,43         20,09         8,59         0,97         9,56           DKI Jakarta         7,86         15,73         23,59         8,27         1,69         9,96           Jawa Enrat         7,92         5,72         13,64         8,02         0,32         8,33           Jawa Eimur         7,35<	• •	• •			• •		• •
Sumatera Barat         7,37         18,21         25,59         6,74         0,26         7,00           Riau         8,05         3,62         11,67         7,65         0,13         7,77           Jambi         6,77         3,61         10,37         6,57         0,24         6,81           Sumatera Selatan         8,15         3,45         11,60         7,45         0,23         7,68           Bengkulu         6,46         3,61         10,07         6,35         0,06         6,41           Lampung         7,59         2,50         10,08         7,22         0,16         7,33           Kep. Bangka Belitung         7,68         7,08         14,76         7,22         0,16         7,38           Kep. Riau         8,66         11,43         20,09         8,59         0,97         9,56           DKI Jakarta         7,86         15,73         23,59         8,27         1,69         9,96           Jawa Barat         7,92         5,72         13,64         8,02         0,32         8,33           Jawa Timur         6,22         42,40         48,62         6,48         0,16         6,64           DI Yogyakarta         7,35		-	-		-	•	
Riau		•	-		•	•	
Jambil         6,77         3,61         10,37         6,57         0,24         6,81           Sumatera Selatan         8,15         3,45         11,60         7,45         0,23         7,68           Bengkulu         6,46         3,61         10,07         6,35         0,06         6,41           Lampung         7,59         2,50         10,08         7,25         0,08         7,33           Kep. Bangka Belitung         7,68         7,08         14,76         7,22         0,16         7,38           Kep. Riau         8,66         11,43         20,09         8,59         0,97         9,56           DKI Jakarta         7,86         15,73         23,59         8,27         1,69         9,96           Jawa Barat         7,92         5,72         13,64         8,02         0,32         8,33           Jawa Timur         6,22         24,240         48,62         6,48         0,16         6,64           DI Yogyakarta         7,35         24,37         31,72         7,40         0,70         8,10           Jawa Timur         6,27         4,37         10,64         6,10         0,22         6,32           Bali         6,79 </td <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td>,</td> <td>•</td> <td></td>		•			,	•	
Sumatera Selatan         8,15         3,45         11,60         7,45         0,23         7,68           Bengkulu         6,46         3,61         10,07         6,35         0,06         6,41           Lampung         7,59         2,50         10,08         7,25         0,08         7,38           Kep. Bangka Belitung         7,68         7,08         14,76         7,22         0,16         7,38           Kep. Biau         8,66         11,43         20,09         8,59         0,97         9,56           DKI Jakarta         7,86         15,73         23,59         8,27         1,69         9,96           Jawa Barat         7,92         5,72         13,64         8,02         0,32         8,33           Jawa Tengah         6,22         42,40         48,62         6,48         0,16         6,64           DI Yogyakarta         7,35         24,37         31,72         7,40         0,70         8,10           Jawa Timur         6,27         4,37         10,64         6,10         0,22         6,32           Bali         6,79         5,81         12,60         6,44         2,27         8,71           Nusa Tenggara Barat		•	•		,	•	
Bengkulu         6,46         3,61         10,07         6,35         0,06         6,41           Lampung         7,59         2,50         10,08         7,25         0,08         7,33           Kep. Bangka Belitung         7,68         7,08         14,76         7,22         0,16         7,38           Kep. Riau         8,66         11,43         20,09         8,59         0,97         9,56           DKI Jakarta         7,86         15,73         23,59         8,27         1,69         9,96           Jawa Barat         7,92         5,72         13,64         8,02         0,32         8,33           Jawa Tengah         6,22         42,40         48,62         6,48         0,16         6,64           DI Yogyakarta         7,35         24,37         31,72         7,40         0,70         8,10           Jawa Timur         6,27         4,37         10,64         6,10         0,22         6,32           Bali         6,27         4,37         10,64         6,10         0,22         8,08           Bali         6,79         5,81         12,60         6,44         2,27         8,71           Nusa Tenggara Brat         5,39 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td></td>					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Lampung         7,59         2,50         10,08         7,25         0,08         7,33           Kep. Bangka Belitung         7,68         7,08         14,76         7,22         0,16         7,38           Kep. Riau         8,66         11,43         20,09         8,59         0,97         9,56           DKI Jakarta         7,86         15,73         23,59         8,27         1,69         9,96           Jawa Barat         7,92         5,72         13,64         8,02         0,32         8,33           Jawa Tengah         6,22         42,40         48,62         6,48         0,16         6,64           DI Yogyakarta         7,35         24,37         31,72         7,40         0,70         8,10           Jawa Timur         6,27         4,37         10,64         6,10         0,22         6,32           Batten         7,85         9,18         17,02         7,86         0,22         8,08           Bali         6,79         5,81         12,60         6,44         2,27         8,71           Nusa Tenggara Barat         5,39         5,43         10,82         5,93         0,21         6,14           Nusa Tenggara Timur	Sumatera Selatan	8,15		11,60	7,45	0,23	7,68
Kep. Bangka Belitung         7,68         7,08         14,76         7,22         0,16         7,38           Kep. Riau         8,66         11,43         20,09         8,59         0,97         9,56           DKI Jakarta         7,86         15,73         23,59         8,27         1,69         9,96           Jawa Tengah         6,22         42,40         48,62         6,48         0,16         6,64           DI Yogyakarta         7,35         24,37         31,72         7,40         0,70         8,10           Jawa Timur         6,27         4,37         10,64         6,10         0,22         6,32           Banten         7,85         9,18         17,02         7,86         0,22         8,08           Bali         6,79         5,81         12,60         6,44         2,27         8,71           Nusa Tenggara Barat         5,39         5,43         10,82         5,93         0,21         6,14           Nusa Tenggara Timur         1,97         1,17         3,14         2,20         0,04         2,24           Kalimantan Barat         6,60         4,23         10,84         6,76         0,11         6,87           Kalimantan T	Bengkulu	6,46	3,61	10,07	6,35	0,06	6,41
Kep. Riau         8,66         11,43         20,09         8,59         0,97         9,56           DKI Jakarta         7,86         15,73         23,59         8,27         1,69         9,96           Jawa Barat         7,92         5,72         13,64         8,02         0,32         8,33           Jawa Tengah         6,22         42,40         48,62         6,48         0,16         6,64           DI Yogyakarta         7,35         24,37         31,72         7,40         0,70         8,10           Jawa Timur         6,27         4,37         10,64         6,10         0,22         6,32           Banten         7,85         9,18         17,02         7,86         0,22         8,08           Bali         6,79         5,81         12,60         6,44         2,27         8,71           Nusa Tenggara Barat         5,39         5,43         10,82         5,93         0,21         6,14           Nusa Tenggara Timur         1,97         1,17         3,14         2,20         0,04         2,24           Kalimantan Barat         6,60         4,23         10,84         6,76         0,11         6,87           Kalimantan Timur	Lampung	7,59	2,50	10,08	7,25	0,08	7,33
DKI Jakarta         7,86         15,73         23,59         8,27         1,69         9,96           Jawa Barat         7,92         5,72         13,64         8,02         0,32         8,33           Jawa Tengah         6,22         42,40         48,62         6,48         0,16         6,64           DI Yogyakarta         7,35         24,37         31,72         7,40         0,70         8,10           Jawa Timur         6,27         4,37         10,64         6,10         0,22         6,32           Banten         7,85         9,18         17,02         7,86         0,22         8,08           Bali         6,79         5,81         12,60         6,44         2,27         8,71           Nusa Tenggara Barat         5,39         5,43         10,82         5,93         0,21         6,14           Nusa Tenggara Timur         1,97         1,17         3,14         2,20         0,04         2,24           Kalimantan Barat         6,60         4,23         10,84         6,76         0,11         6,87           Kalimantan Timur         7,64         6,81         14,45         7,98         0,24         8,22           Kalimantan Timur	Kep. Bangka Belitung	7,68	7,08	14,76	7,22	0,16	7,38
Jawa Barat         7,92         5,72         13,64         8,02         0,32         8,33           Jawa Tengah         6,22         42,40         48,62         6,48         0,16         6,64           DI Yogyakarta         7,35         24,37         31,72         7,40         0,70         8,10           Jawa Timur         6,27         4,37         10,64         6,10         0,22         6,32           Banten         7,85         9,18         17,02         7,86         0,22         8,08           Bali         6,79         5,81         12,60         6,44         2,27         8,71           Nusa Tenggara Barat         5,39         5,43         10,82         5,93         0,21         6,14           Nusa Tenggara Timur         1,97         1,17         3,14         2,20         0,04         2,24           Kalimantan Barat         6,60         4,23         10,84         6,76         0,11         6,87           Kalimantan Tengah         7,45         20,44         27,89         7,35         0,08         7,44           Kalimantan Timur         7,64         6,81         14,45         7,98         0,24         8,22           Kalimantan	Kep. Riau	8,66	11,43	20,09	8,59	0,97	9,56
Jawa Tengah         6,22         42,40         48,62         6,48         0,16         6,64           DI Yogyakarta         7,35         24,37         31,72         7,40         0,70         8,10           Jawa Timur         6,27         4,37         10,64         6,10         0,22         6,32           Banten         7,85         9,18         17,02         7,86         0,22         8,08           Bali         6,79         5,81         12,60         6,44         2,27         8,71           Nusa Tenggara Barat         5,39         5,43         10,82         5,93         0,21         6,14           Nusa Tenggara Timur         1,97         1,17         3,14         2,20         0,04         2,24           Kalimantan Barat         6,60         4,23         10,84         6,76         0,11         6,87           Kalimantan Tengah         7,45         20,44         27,89         7,35         0,08         7,44           Kalimantan Timur         7,64         6,81         14,45         7,98         0,24         8,22           Kalimantan Utara         6,63         19,25         25,88         6,88         0,09         6,97           Sul	DKI Jakarta	7,86	15,73	23,59	8,27	1,69	9,96
Di Yogyakarta   7,35   24,37   31,72   7,40   0,70   8,10     Jawa Timur   6,27   4,37   10,64   6,10   0,22   6,32     Banten   7,85   9,18   17,02   7,86   0,22   8,08     Bali   6,79   5,81   12,60   6,44   2,27   8,71     Nusa Tenggara Barat   5,39   5,43   10,82   5,93   0,21   6,14     Nusa Tenggara Timur   1,97   1,17   3,14   2,20   0,04   2,24     Kalimantan Barat   6,60   4,23   10,84   6,76   0,11   6,87     Kalimantan Tengah   7,45   20,44   27,89   7,35   0,08   7,44     Kalimantan Selatan   7,82   6,27   14,09   7,61   0,22   7,83     Kalimantan Timur   7,64   6,81   14,45   7,98   0,24   8,22     Kalimantan Utara   6,63   19,25   25,88   6,88   0,09   6,97     Sulawesi Utara   4,51   5,78   10,29   4,00   0,40   4,40     Sulawesi Tengah   3,80   7,41   11,22   3,70   0,04   3,74     Sulawesi Tenggara   4,45   5,03   9,48   4,69   0,06   4,74     Gorontalo   3,34   5,56   8,89   3,46   0,05   3,51     Sulawesi Barat   3,62   2,43   6,05   3,89   0,06   3,95     Maluku Utara   2,53   3,33   5,86   2,51   0,21   2,72     Papua Barat   4,12   4,91   9,03   4,44   0,16   4,60     Usaha PMM Skala UMK +	Jawa Barat	7,92	5,72	13,64	8,02	0,32	8,33
Jawa Timur         6,27         4,37         10,64         6,10         0,22         6,32           Banten         7,85         9,18         17,02         7,86         0,22         8,08           Bali         6,79         5,81         12,60         6,44         2,27         8,71           Nusa Tenggara Barat         5,39         5,43         10,82         5,93         0,21         6,14           Nusa Tenggara Timur         1,97         1,17         3,14         2,20         0,04         2,24           Kalimantan Barat         6,60         4,23         10,84         6,76         0,11         6,87           Kalimantan Tengah         7,45         20,44         27,89         7,35         0,08         7,44           Kalimantan Selatan         7,82         6,27         14,09         7,61         0,22         7,83           Kalimantan Timur         7,64         6,81         14,45         7,98         0,24         8,22           Kalimantan Utara         6,63         19,25         25,88         6,88         0,09         6,97           Sulawesi Utara         4,51         5,78         10,29         4,00         0,40         4,40           <	Jawa Tengah	6,22	42,40	48,62	6,48	0,16	6,64
Banten         7,85         9,18         17,02         7,86         0,22         8,08           Bali         6,79         5,81         12,60         6,44         2,27         8,71           Nusa Tenggara Barat         5,39         5,43         10,82         5,93         0,21         6,14           Nusa Tenggara Timur         1,97         1,17         3,14         2,20         0,04         2,24           Kalimantan Barat         6,60         4,23         10,84         6,76         0,11         6,87           Kalimantan Tengah         7,45         20,44         27,89         7,35         0,08         7,44           Kalimantan Selatan         7,82         6,27         14,09         7,61         0,22         7,83           Kalimantan Utara         6,63         19,25         25,88         6,88         0,09         6,97           Sulawesi Utara         4,51         5,78         10,29         4,00         0,40         4,40           Sulawesi Tengah         3,80         7,41         11,22         3,70         0,04         3,74           Sulawesi Selatan         6,54         16,50         23,04         6,03         0,17         6,20	DI Yogyakarta	7,35	24,37	31,72	7,40	0,70	8,10
Bali         6,79         5,81         12,60         6,44         2,27         8,71           Nusa Tenggara Barat         5,39         5,43         10,82         5,93         0,21         6,14           Nusa Tenggara Timur         1,97         1,17         3,14         2,20         0,04         2,24           Kalimantan Barat         6,60         4,23         10,84         6,76         0,11         6,87           Kalimantan Tengah         7,45         20,44         27,89         7,35         0,08         7,44           Kalimantan Tengah         7,82         6,27         14,09         7,61         0,22         7,83           Kalimantan Timur         7,64         6,81         14,45         7,98         0,24         8,22           Kalimantan Utara         6,63         19,25         25,88         6,88         0,09         6,97           Sulawesi Utara         4,51         5,78         10,29         4,00         0,40         4,40           Sulawesi Tengah         3,80         7,41         11,22         3,70         0,04         3,74           Gorontalo         3,34         5,56         8,89         3,46         0,05         3,51	Jawa Timur	6,27	4,37	10,64	6,10	0,22	6,32
Nusa Tenggara Barat 5,39 5,43 10,82 5,93 0,21 6,14 Nusa Tenggara Timur 1,97 1,17 3,14 2,20 0,04 2,24 Kalimantan Barat 6,60 4,23 10,84 6,76 0,11 6,87 Kalimantan Tengah 7,45 20,44 27,89 7,35 0,08 7,44 Kalimantan Selatan 7,82 6,27 14,09 7,61 0,22 7,83 Kalimantan Timur 7,64 6,81 14,45 7,98 0,24 8,22 Kalimantan Utara 6,63 19,25 25,88 6,88 0,09 6,97 Sulawesi Utara 4,51 5,78 10,29 4,00 0,40 4,40 Sulawesi Tengah 3,80 7,41 11,22 3,70 0,04 3,74 Sulawesi Selatan 6,54 16,50 23,04 6,03 0,17 6,20 Sulawesi Tenggara 4,45 5,03 9,48 4,69 0,06 4,74 Gorontalo 3,34 5,56 8,89 3,46 0,05 3,51 Sulawesi Barat 3,62 2,43 6,05 3,89 0,06 3,95 Maluku Utara 2,53 3,33 5,86 2,51 0,21 2,72 Papua Barat 4,12 4,91 9,03 4,44 0,16 4,60 Papua 3,58 2,30 5,88 3,70 0,08 3,77 Indonesia 6,76 11,68 18,44 6,74 0,31 7,05 Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK	Banten	7,85	9,18	17,02	7,86	0,22	8,08
Nusa Tenggara Timur         1,97         1,17         3,14         2,20         0,04         2,24           Kalimantan Barat         6,60         4,23         10,84         6,76         0,11         6,87           Kalimantan Tengah         7,45         20,44         27,89         7,35         0,08         7,44           Kalimantan Tengah         7,82         6,27         14,09         7,61         0,22         7,83           Kalimantan Timur         7,64         6,81         14,45         7,98         0,24         8,22           Kalimantan Utara         6,63         19,25         25,88         6,88         0,09         6,97           Sulawesi Utara         4,51         5,78         10,29         4,00         0,40         4,40           Sulawesi Tengah         3,80         7,41         11,22         3,70         0,04         3,74           Sulawesi Selatan         6,54         16,50         23,04         6,03         0,17         6,20           Sulawesi Tenggara         4,45         5,03         9,48         4,69         0,06         4,74           Gorontalo         3,34         5,56         8,89         3,46         0,05         3,51	Bali	6,79	5,81	12,60	6,44	2,27	8,71
Kalimantan Barat         6,60         4,23         10,84         6,76         0,11         6,87           Kalimantan Tengah         7,45         20,44         27,89         7,35         0,08         7,44           Kalimantan Selatan         7,82         6,27         14,09         7,61         0,22         7,83           Kalimantan Timur         7,64         6,81         14,45         7,98         0,24         8,22           Kalimantan Utara         6,63         19,25         25,88         6,88         0,09         6,97           Sulawesi Utara         4,51         5,78         10,29         4,00         0,40         4,40           Sulawesi Tengah         3,80         7,41         11,22         3,70         0,04         3,74           Sulawesi Selatan         6,54         16,50         23,04         6,03         0,17         6,20           Sulawesi Tenggara         4,45         5,03         9,48         4,69         0,06         4,74           Gorontalo         3,34         5,56         8,89         3,46         0,05         3,51           Sulawesi Barat         3,62         2,43         6,05         3,89         0,06         3,95 <t< td=""><td>Nusa Tenggara Barat</td><td>5,39</td><td>5,43</td><td>10,82</td><td>5,93</td><td>0,21</td><td>6,14</td></t<>	Nusa Tenggara Barat	5,39	5,43	10,82	5,93	0,21	6,14
Kalimantan Tengah         7,45         20,44         27,89         7,35         0,08         7,44           Kalimantan Selatan         7,82         6,27         14,09         7,61         0,22         7,83           Kalimantan Timur         7,64         6,81         14,45         7,98         0,24         8,22           Kalimantan Utara         6,63         19,25         25,88         6,88         0,09         6,97           Sulawesi Utara         4,51         5,78         10,29         4,00         0,40         4,40           Sulawesi Tengah         3,80         7,41         11,22         3,70         0,04         3,74           Sulawesi Selatan         6,54         16,50         23,04         6,03         0,17         6,20           Sulawesi Tenggara         4,45         5,03         9,48         4,69         0,06         4,74           Gorontalo         3,34         5,56         8,89         3,46         0,05         3,51           Sulawesi Barat         3,62         2,43         6,05         3,89         0,06         3,95           Maluku         2,98         3,59         6,57         2,89         0,10         2,99	Nusa Tenggara Timur	1,97	1,17	3,14	2,20	0,04	2,24
Kalimantan Selatan         7,82         6,27         14,09         7,61         0,22         7,83           Kalimantan Timur         7,64         6,81         14,45         7,98         0,24         8,22           Kalimantan Utara         6,63         19,25         25,88         6,88         0,09         6,97           Sulawesi Utara         4,51         5,78         10,29         4,00         0,40         4,40           Sulawesi Tengah         3,80         7,41         11,22         3,70         0,04         3,74           Sulawesi Selatan         6,54         16,50         23,04         6,03         0,17         6,20           Sulawesi Tenggara         4,45         5,03         9,48         4,69         0,06         4,74           Gorontalo         3,34         5,56         8,89         3,46         0,05         3,51           Sulawesi Barat         3,62         2,43         6,05         3,89         0,06         3,95           Maluku         2,98         3,59         6,57         2,89         0,10         2,99           Maluku Utara         2,53         3,33         5,86         2,51         0,21         2,72           Pap	Kalimantan Barat	6,60	4,23	10,84	6,76	0,11	6,87
Kalimantan Timur         7,64         6,81         14,45         7,98         0,24         8,22           Kalimantan Utara         6,63         19,25         25,88         6,88         0,09         6,97           Sulawesi Utara         4,51         5,78         10,29         4,00         0,40         4,40           Sulawesi Tengah         3,80         7,41         11,22         3,70         0,04         3,74           Sulawesi Selatan         6,54         16,50         23,04         6,03         0,17         6,20           Sulawesi Tenggara         4,45         5,03         9,48         4,69         0,06         4,74           Gorontalo         3,34         5,56         8,89         3,46         0,05         3,51           Sulawesi Barat         3,62         2,43         6,05         3,89         0,06         3,95           Maluku         2,98         3,59         6,57         2,89         0,10         2,99           Maluku Utara         2,53         3,33         5,86         2,51         0,21         2,72           Papua Barat         4,12         4,91         9,03         4,44         0,16         4,60           Usaha PMM S	Kalimantan Tengah	7,45	20,44	27,89	7,35	0,08	7,44
Kalimantan Utara         6,63         19,25         25,88         6,88         0,09         6,97           Sulawesi Utara         4,51         5,78         10,29         4,00         0,40         4,40           Sulawesi Tengah         3,80         7,41         11,22         3,70         0,04         3,74           Sulawesi Selatan         6,54         16,50         23,04         6,03         0,17         6,20           Sulawesi Tenggara         4,45         5,03         9,48         4,69         0,06         4,74           Gorontalo         3,34         5,56         8,89         3,46         0,05         3,51           Sulawesi Barat         3,62         2,43         6,05         3,89         0,06         3,95           Maluku         2,98         3,59         6,57         2,89         0,10         2,99           Maluku Utara         2,53         3,33         5,86         2,51         0,21         2,72           Papua Barat         4,12         4,91         9,03         4,44         0,16         4,60           Papua         3,58         2,30         5,88         3,70         0,08         3,77           Indonesia	Kalimantan Selatan	7,82	6,27	14,09	7,61	0,22	7,83
Sulawesi Utara         4,51         5,78         10,29         4,00         0,40         4,40           Sulawesi Tengah         3,80         7,41         11,22         3,70         0,04         3,74           Sulawesi Selatan         6,54         16,50         23,04         6,03         0,17         6,20           Sulawesi Tenggara         4,45         5,03         9,48         4,69         0,06         4,74           Gorontalo         3,34         5,56         8,89         3,46         0,05         3,51           Sulawesi Barat         3,62         2,43         6,05         3,89         0,06         3,95           Maluku         2,98         3,59         6,57         2,89         0,10         2,99           Maluku Utara         2,53         3,33         5,86         2,51         0,21         2,72           Papua Barat         4,12         4,91         9,03         4,44         0,16         4,60           Papua         3,58         2,30         5,88         3,70         0,08         3,77           Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK         13,81         13,81         13,81         13,81	Kalimantan Timur	7,64	6,81	14,45	7,98	0,24	8,22
Sulawesi Tengah         3,80         7,41         11,22         3,70         0,04         3,74           Sulawesi Selatan         6,54         16,50         23,04         6,03         0,17         6,20           Sulawesi Tenggara         4,45         5,03         9,48         4,69         0,06         4,74           Gorontalo         3,34         5,56         8,89         3,46         0,05         3,51           Sulawesi Barat         3,62         2,43         6,05         3,89         0,06         3,95           Maluku         2,98         3,59         6,57         2,89         0,10         2,99           Maluku Utara         2,53         3,33         5,86         2,51         0,21         2,72           Papua Barat         4,12         4,91         9,03         4,44         0,16         4,60           Papua         3,58         2,30         5,88         3,70         0,08         3,77           Indonesia         6,76         11,68         18,44         6,74         0,31         7,05           Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK         13,81         13,81         13,81         13,81	Kalimantan Utara	6,63	19,25	25,88	6,88	0,09	6,97
Sulawesi Selatan         6,54         16,50         23,04         6,03         0,17         6,20           Sulawesi Tenggara         4,45         5,03         9,48         4,69         0,06         4,74           Gorontalo         3,34         5,56         8,89         3,46         0,05         3,51           Sulawesi Barat         3,62         2,43         6,05         3,89         0,06         3,95           Maluku         2,98         3,59         6,57         2,89         0,10         2,99           Maluku Utara         2,53         3,33         5,86         2,51         0,21         2,72           Papua Barat         4,12         4,91         9,03         4,44         0,16         4,60           Papua         3,58         2,30         5,88         3,70         0,08         3,77           Indonesia         6,76         11,68         18,44         6,74         0,31         7,05           Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK         13,81         13,81         13,81         13,81	Sulawesi Utara	4,51	5,78	10,29	4,00	0,40	4,40
Sulawesi Tenggara         4,45         5,03         9,48         4,69         0,06         4,74           Gorontalo         3,34         5,56         8,89         3,46         0,05         3,51           Sulawesi Barat         3,62         2,43         6,05         3,89         0,06         3,95           Maluku         2,98         3,59         6,57         2,89         0,10         2,99           Maluku Utara         2,53         3,33         5,86         2,51         0,21         2,72           Papua Barat         4,12         4,91         9,03         4,44         0,16         4,60           Papua         3,58         2,30         5,88         3,70         0,08         3,77           Indonesia         6,76         11,68         18,44         6,74         0,31         7,05           Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK         13,81         13,81         13,81         13,81	Sulawesi Tengah	3,80	7,41	11,22	3,70	0,04	3,74
Gorontalo         3,34         5,56         8,89         3,46         0,05         3,51           Sulawesi Barat         3,62         2,43         6,05         3,89         0,06         3,95           Maluku         2,98         3,59         6,57         2,89         0,10         2,99           Maluku Utara         2,53         3,33         5,86         2,51         0,21         2,72           Papua Barat         4,12         4,91         9,03         4,44         0,16         4,60           Papua         3,58         2,30         5,88         3,70         0,08         3,77           Indonesia         6,76         11,68         18,44         6,74         0,31         7,05           Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK         13,81         13,81         13,81         13,81	Sulawesi Selatan	6,54	16,50	23,04	6,03	0,17	6,20
Sulawesi Barat         3,62         2,43         6,05         3,89         0,06         3,95           Maluku         2,98         3,59         6,57         2,89         0,10         2,99           Maluku Utara         2,53         3,33         5,86         2,51         0,21         2,72           Papua Barat         4,12         4,91         9,03         4,44         0,16         4,60           Papua         3,58         2,30         5,88         3,70         0,08         3,77           Indonesia         6,76         11,68         18,44         6,74         0,31         7,05           Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK         13,81         13,81         13,81         13,81	Sulawesi Tenggara	4,45	5,03	9,48	4,69	0,06	4,74
Maluku         2,98         3,59         6,57         2,89         0,10         2,99           Maluku Utara         2,53         3,33         5,86         2,51         0,21         2,72           Papua Barat         4,12         4,91         9,03         4,44         0,16         4,60           Papua         3,58         2,30         5,88         3,70         0,08         3,77           Indonesia         6,76         11,68         18,44         6,74         0,31         7,05           Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK         13,81         13,81         13,81	Gorontalo	3,34	5,56	8,89	3,46	0,05	3,51
Maluku         2,98         3,59         6,57         2,89         0,10         2,99           Maluku Utara         2,53         3,33         5,86         2,51         0,21         2,72           Papua Barat         4,12         4,91         9,03         4,44         0,16         4,60           Papua         3,58         2,30         5,88         3,70         0,08         3,77           Indonesia         6,76         11,68         18,44         6,74         0,31         7,05           Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK         13,81         13,81         13,81	Sulawesi Barat					0,06	
Maluku Utara       2,53       3,33       5,86       2,51       0,21       2,72         Papua Barat       4,12       4,91       9,03       4,44       0,16       4,60         Papua       3,58       2,30       5,88       3,70       0,08       3,77         Indonesia       6,76       11,68       18,44       6,74       0,31       7,05         Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK       13,81       13,81       13,81	Maluku	2,98		6,57	2,89	0,10	
Papua Barat         4,12         4,91         9,03         4,44         0,16         4,60           Papua         3,58         2,30         5,88         3,70         0,08         3,77           Indonesia         6,76         11,68         18,44         6,74         0,31         7,05           Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK         13,81         13,81         13,81	Maluku Utara						
Papua         3,58         2,30         5,88         3,70         0,08         3,77           Indonesia         6,76         11,68         18,44         6,74         0,31         7,05           Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK         13,81         13,81         13,81	Papua Barat					0,16	
Indonesia         6,76         11,68         18,44         6,74         0,31         7,05           Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK         13,81         13,81         13,81	Papua			•			3,77
Usaha PMM Skala UMK + 13,81 13,81	Indonesia						
	Usaha PMM Skala UMK +		·				
, , -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,		6,76	11,68	18,44	6,74	14,12	20,86

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hotel, Usaha PMM, Industri Pengolahan, dan Jasa Kesehatan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tidak termasuk Jasa Kesehatan

# 3.5 Konsumsi Ikan Segar

Ikan merupakan sumber protein hewani dengan jumlah produksi paling tinggi sehingga kontribusinya terhadap penyediaan protein hewani paling besar. Hal ini merupakan suatu hal yang harus diperhatikan melihat negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat kaya akan sumber daya hayati laut, dengan potensi sumber daya ikan laut dan biota laut yang sangat berlimpah. Disamping melimpah akan sumber daya laut, juga kaya akan biota air lainnya seperti yang terdapat di sungai, danau, atau kolam, baik yang di alam bebas maupun yang dibudidayakan masyarakat. Potensi sumber daya air yang cukup melimpah tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi ikan atau biota air lainnya bagi masyarakat.

Ikan merupakan salah satu jenis makanan sehat yang kandungan proteinnya cukup tinggi, rendah lemak jenuh, serta menyimpan asam lemak omega 3 yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga tubuh tetap sehat. Terutama bagi orang yang sedang melakukan program diet, sangat baik untuk memanfaatkan vitamin, mineral, dan nutrisi yang ada dalam kandungan ikan.

Penggunaan berbagai jenis ikan serta biota air lainnya di dalam negeri dalam publikasi Konsumsi Bahan Pokok tahun 2019 ini meliputi ikan tuna/tongkol/cakalang, ikan lele, ikan mas/nila, ikan kembung/banyar, ikan bandeng, ikan mujair, dan ikan lainnya serta hewan air selain ikan (bukan rumput laut).

Tabel 3.13 Konsumsi Ikan Segar menurut Institusi Pengguna (ton), 2017 dan 2019

	2017	7	2019			
Institusi	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Rumah tangga	4 103 343	15,72	4 618 590	17,30		
INDUSTRI	3 103 704	11,89	8 460 541	31,70		
Industri Besar Sedang	2 523 489	9,67	7 845 174	29,39		
Industri Mikro Kecil	580 215	2,22	615 367	2,31		
HOREKA	1 687 582	6,46	1 273 695	4,77		
Hotel	5 621	0,02	22 042	0,08		
Restoran dan Catering	24 232	0,09	19 917 <sup>1)</sup>	0,07		
Rumah makan dan PMM Lainnya	1 657 729	6,35	1 231 736 <sup>2)</sup>	4,61		
JASA	5 567	0,02	5 567	0,02		
Jasa Kesehatan	5 567	0,02	5 567 <sup>3)</sup>	0,02		
Total	8 448 307	32,36	14 358 393	53,79		

Keterangan

<sup>1)</sup> Hasil Survei VREST20 UMB

<sup>2)</sup> Hasil Survei VREST20 UMK

<sup>3)</sup> Asumsi sama dengan tahun 2017

Sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 3.13 bahwa penggunaan berbagai jenis ikan serta biota air lainnya di dalam negeri selama tahun 2019, baik untuk konsumsi rumah tangga dan diluar rumah tangga selama tahun 2019 mencapai sebanyak 14,36 juta ton, dengan rata-rata konsumsi sebesar 53,79 kg per kapita per tahun. Penggunaan terbesar dilakukan industri pengolahan (besar dan sedang) yang mencapai sekitar 54,64 persen dari total konsumsi ikan dan biota air lainnya di Indonesia. Dibandingkan dengan tahun 2017, ada peningkatan konsumsi ikan sekitar dari 2,52 juta ton menjadi 7,84 juta ton pada tahun 2019.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki kebutuhan ikan dan biota air paling banyak dibandingkan dengan provinsi lain, dimana selama tahun 2019 mencapai sekitar 2,62 juta ton atau sekitar 20,98 persen dari total penggunaan ikan dan biota air diluar usaha penyedia makan minum lainnya (UMK) dan IMK di dalam negeri. Provinsi berikutnya dengan konsumsi ikan dan biota air terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 2.00 juta ton dan Provinsi DKI Jakarta sebesar 2,42 juta ton. Sedangkan total kebutuhan ikan dan biota air yang terendah adalah di Provinsi Bengkulu, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara, yang masing-masing sebesar 36,47 ribu ton, 37,88 ribu ton, dan 39,03 ribu ton.

Konsumsi ikan dan biota air per kapita selama tahun 2019 diluar usaha penyedia makan minum lainnya (UMK) dan IMK di dalam negeri yang tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 155,99 kg per kapita per tahun. Selanjutnya terjadi di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Sulawesi Selatan yang masing-masing mencapai sekitar 134,73 kg dan 110,73 kg per kapita per tahun. Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi dengan tingkat kebutuhan konsumsi ikan dan biota air paling rendah yaitu hanya sekitar 17,26 kg per kapita per tahun, selanjutnya Provinsi Bali sebesar 17,76 kg per kapita per tahun.

Tabel 3.14 Konsumsi IkanSegar Menurut Provinsi (ton), 2017 dan 2019

		2017			2019			
Provinsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP) <sup>1)</sup>	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga <sup>2)</sup>	Total Konsumsi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
Aceh	139 280	34 827	174 107	170 102,99	494,24	170 597,23		
Sumatera Utara	268 392	288 422	556 815	332 938,16	562 069,24	895 007,40		
Sumatera Barat	83 380	216 718	300 098	93 850,09	722,70	94 572,79		
Riau	129 157	38 556	167 713	165 176,17	2 256,35	167 432,51		
Jambi	62 689	34 474	97 164	74 389,48	1 445,11	75 834,59		
Sumatera Selatan	177 766	37 612	215 378	179 421,53	2 817,10	182 238,63		
Bengkulu	31 749	7 980	39 729	36 431,31	36,85	36 468,16		
Lampung	134 026	24 358	158 384	144 635,04	167 618,35	312 253,40		
Kep. Bangka Belitung	46 140	14 081	60 221	54 806,54	3 239,32	58 045,86		
Kep. Riau	58 499	21 212	79 711	63 053,16	30 780,44	93 833,61		
DKI Jakarta	169 198	106 438	275 636	207 770,87	1 207 459,65	1 415 230,52		
Jawa Barat	505 381	313 105	818 485	539 753,16	1 466 139,69	2 005 892,85		
Jawa Tengah	256 149	1 405 179	1 661 328	289 220,81	516 269,59	805 490,41		
DI Yogyakarta	26 112	31 409	57 521	29 464,82	126 787,14	156 251,96		
Jawa Timur	466 080	1 211 396	1 677 476	494 477,59	2 129 647,67	2 624 125,26		
Banten	197 751	42 993	240 744	234 256,62	515 874,78	750 131,39		
Bali	34 173	78 882	113 055	40 263,76	37 214,20	77 477,95		
Nusa Tenggara Barat	74 570	19 785	94 355	102 589,33	5 112,54	107 701,86		
Nusa Tenggara Timur	75 641	25 813	101 455	91 809,83	26 228,57	118 038,40		
Kalimantan Barat	96 667	14 589	111 256	111 970,60	2 218,24	114 188,84		
Kalimantan Tengah	64 019	11 808	75 826	70 651,21	105,61	70 756,82		
Kalimantan Selatan	103 642	31 510	135 153	107 342,56	6 008,78	113 351,34		
Kalimantan Timur	96 466	27 742	124 208	111 016,19	3 311,82	114 328,01		
Kalimantan Utara	21 068	11 589	32 657	25 477,21	13 553,14	39 030,35		
Sulawesi Utara	78 650	102 322	180 972	84 094,45	304 956,22	389 050,67		
Sulawesi Tengah	80 566	28 874	109 440	88 921,34	21 027,95	109 949,28		
Sulawesi Selatan	253 402	38 699	292 100	281 529,87	695 066,48	976 596,35		
Sulawesi Tenggara	97 565	36 306	133 871	101 916,14	6 335,10	108 251,24		
Gorontalo	36 787	15 317	52 104	41 269,21	3 705,61	44 974,82		
Sulawesi Barat	32 815	5 537	38 353	37 748,31	130,65	37 878,96		
Maluku	67 884	30 078	97 963	63 726,10	12 925,85	76 651,94		
Maluku Utara	47 455	8 974	56 429	46 342,66	2 064,63	48 407,29		
Papua Barat	30 079	23 362	53 441	32 810,89	12 985,45	45 796,34		
Papua	60 144	5 015	65 159	69 361,95	523,13	69 885,08		
Indonesia	4 103 343	4 344 964	8 448 307	4 618 589,93	7 887 132,20	12 505 722,12		
Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK					1 847 103,44	1 847 103,44		
Indonesia	4 103 343	4 344 964	8 448 307	4 618 589,93	9 734 235,64	14 352 825,56		
				,	,	,		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hotel, Usaha PMM, Industri Pengolahan, dan Jasa Kesehatan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tidak termasuk Jasa Kesehatan

Tabel 3.15 Konsumsi Ikan Segar per Kapita per Tahun Menurut Provinsi (kg), 2017 dan 2019

		2017		2019			
Provinsi	Di Dalam Di Luar Rumah Rumah Tangga Tangga (Susenas) (VKBP) <sup>1)</sup>		Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga <sup>2)</sup>	Total Konsumsi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Aceh	26,96	6,74	33,70	32,00	0,09	32,09	
Sumatera Utara	18,87	20,28	39,15	22,74	38,39	61,14	
Sumatera Barat	15,71	40,84	56,56	17,13	0,13	17,26	
Riau	19,52	5,83	25,34	24,17	0,33	24,50	
Jambi	17,91	9,85	27,75	20,86	0,41	21,26	
Sumatera Selatan	21,57	4,56	26,14	21,12	0,33	21,45	
Bengkulu	16,48	4,14	20,62	18,48	0,02	18,49	
Lampung	16,21	2,95	19,16	17,10	19,82	36,92	
Kep. Bangka Belitung	32,41	9,89	42,30	37,77	2,23	40,00	
Kep. Riau	28,27	10,25	38,53	28,13	13,73	41,86	
DKI Jakarta	16,35	10,28	26,63	19,78	114,95	134,73	
Jawa Barat	10,56	6,54	17,10	11,01	29,91	40,92	
Jawa Tengah	7,49	41,09	48,58	8,37	14,94	23,31	
DI Yogyakarta	6,96	8,37	15,33	7,62	32,77	40,39	
Jawa Timur	11,88	30,87	42,75	12,44	53,58	66,02	
Banten	15,97	3,47	19,44	18,42	40,57	59,00	
Bali	8,07	18,63	26,70	9,23	8,53	17,76	
Nusa Tenggara Barat	15,09	4,00	19,10	19,91	0,99	20,90	
Nusa Tenggara Timur	14,36	4,90	19,27	16,89	4,82	21,71	
Kalimantan Barat	19,67	2,97	22,64	22,19	0,44	22,63	
Kalimantan Tengah	24,70	4,56	29,26	26,66	0,04	26,70	
Kalimantan Selatan	25,26	7,68	32,93	25,46	1,43	26,88	
Kalimantan Timur	27,12	7,80	34,92	30,67	0,91	31,58	
Kalimantan Utara	30,77	16,92	47,69	36,63	19,48	56,11	
Sulawesi Utara	32,04	41,68	73,72	33,72	122,27	155,99	
Sulawesi Tengah	27,26	9,77	37,03	29,23	6,91	36,14	
Sulawesi Selatan	29,23	4,46	33,69	31,92	78,81	110,73	
Sulawesi Tenggara	37,68	14,02	51,70	38,26	2,38	40,64	
Gorontalo	31,61	13,16	44,77	35,08	3,15	38,23	
Sulawesi Barat	24,77	4,18	28,95	27,77	0,10	27,87	
Maluku	39,07	17,31	56,39	36,03	7,31	43,34	
Maluku Utara	39,43	7,46	46,89	37,50	1,67	39,17	
Papua Barat	33,06	25,68	58,74	34,05	13,48	47,53	
Papua	18,50	1,54	20,04	20,72	0,16	20,88	
Indonesia	15,72	16,64	32,36	17,30	29,55	46,85	
Usaha PMM Skala UMK + Industri IMK	,		3-,-3		6,92	6,92	
Indonesia	15,72	16,64	32,36	17,30	36,47	53,77	
	13,,2	10,04	32,30	17,50	30,47	33,77	

 $<sup>^{1}</sup>$  Hotel, Usaha PMM, Industri Pengolahan, dan Jasa Kesehatan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tidak termasuk Jasa Kesehatan

### 3.6 Konsumsi Jagung

Jagung merupakan salah satu komoditas utama tanaman pangan selain beras. Jagung merupakan komoditas pangan yang berperan sebagai bahan pokok juga sebagai sumber karbohidrat yang cukup tinggi. Hal ini menempatkan posisi jagung sebagai salah satu diversifikasi konsumsi pangan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap beras. Sebagai komoditas pangan terpenting kedua setelah beras, produksi jagung harus senantiasa ditingkatkan agar dapat mempertahankan ketersediaan bahan pangan yang cukup dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Jagung selain sebagai bahan pangan manusia juga dapat digunakan sebagai sumber biomas serta bahan baku utama dari industri pengolahan pakan ternak, unggas dan ikan. Disamping itu, jagung juga dapat digunakan sebagai bahan makanan dan minuman serta merupakan komoditas bisnis strategis yang dari waktu ke waktu semakin popular seperti untuk bahan baku pembuatan bihun. Teknologi pengolahan jagung menjadi bihun diharapkan dapat memperkecil penggunaan tepung terigu, sehingga akan mengurangi impor gandum. Sehingga ketersediaan komoditi jagung memerlukan pasokan yang cukup besar.

Tabel 3.16 Konsumsi Jagung menurut Institusi Pengguna (ton), 2014 - 2019

	20	14	201	2015		2017		2019	
Institusi	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)		Per Kapita (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
Rumah tangga	369 339	1,47	455 193	1,79	390 935	1,5	439 633		1,65
INDUSTRI	6 460 212	25,70	3 910 876	15,36	4 830 853	18,50	12 223 305		45,80
Industri Besar Sedang	6 378 387	25,37	3 694 024	14,51	4 772 792	18,28	6 834 426	4)	25,61
							5 243 176	5)	19,64
Industri Mikro Kecil	81 825	0,33	216 852	0,85	58 061	0,22	145 703		0,55
HOREKA	135 300	0,53	131 951	0,51	219 769	0,84	219 769		0,82
Hotel	790	0	857	0	815	0	815	3)	0,00
Restoran dan Catering	887	0	1 291	0	12 835	0,05	12 835	3)	0,05
Rumah makan dan PMM Lainnya	133 623	0,53	129 803	0,51	206 119	0,79	206 119	3)	0,77
JASA	656	-	1 349	-	539	0,002	539		0,002
Jasa Kesehatan	647	0	1 180	0	539	0,002	539	3)	0,002
Jasa Lainnya	9	0	169	0		-			-
Total	6 965 506	27,71	4 499 369	17,67	5 442 095	20,84	12 883 246		48,27

<sup>3)</sup> Asumsi sama dengan tahun 2017

<sup>4)</sup> Jagung kering

<sup>5)</sup> Jagung lainnya

Informasi konsumsi penggunaan komoditas jagung sebelum tahun 2019 yang dikumpulkan dalam Industri Besar Sedang meliputi bungkil jagung, jagung pipilan kering, jagung muda kering, dan jagung muda lainnya. Sementara dalam penghitungan total penggunaan disetarakan menjadi **jagung pipilan kering**. Perlu diketahui bahwa total penggunaan komoditas jagung tersebut belum mencakup untuk kebutuhan pakan ternak secara langsung, baik oleh perusahaan ternak dan unggas maupun rumah tangga usaha peternakan. Sedangkan di tahun 2019 cakupan komoditas jagung pada Industri Besar Sedang adalah penggunaan jagung untuk makanan dan penggunaan jagung untuk non makanan. Sementara penggunaan jagung dibedakan menjadi **jagung kering** dan **jagung lainnya**. Jagung kering terdiri atas jagung pipilan kering dan jagung muda kering, sedangkan jagung lainnya terdiri atas jagung, jagung curah dan jagung kuning. Dari tabel 3.16 dapat terlihat bahwa konsumsi jagung di Indonesia tahun 2019 cukup tinggi, yaitu 12,88 juta ton jagung. Terjadi peningkatan yang cukup besar dibanding tahun 2017. Konsumsi jagung terbesar adalah untuk industri pengolahan yang merupakan konsumsi untuk industri pangan dan non makanan, sebesar 12,22 juta ton atau 94,88 persen dari total penggunaan jagung. Secara rata-rata, penggunaan komoditas jagung pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan dari 20,84 kg menjadi 48,27 kg per kapita per tahun.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki total penggunaan komoditas jagung terbanyak dibandingkan provinsi lain, yaitu mencapai sekitar 3,14 juta ton selama tahun 2019. Provinsi berikutnya dengan penggunaan jagung terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 2,62 juta ton dan Provinsi Banten mencapai 1,89 juta ton. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah kebutuhan untuk pasokan Industri Besar Sedang (IBS) di masing-masing provinsi tersebut, terutama industri pakan ternak. Berdasarkan penggunaan komoditas jagung per kapita selama tahun 2019, menunjukkan bahwa Provinsi Banten merupakan yang tertinggi hingga mencapai sebesar 148,35 kg per kapita per tahun, Sumatera Utara sebesar 85,86 kg per kapita per tahun, dan Lampung sebesar 81,33 kg per kapita per tahun. Perlu diketahui bahwa total penggunaan komoditas jagung tersebut belum mencakup untuk kebutuhan pakan ternak secara langsung, baik oleh perusahaan ternak dan unggas maupun rumah tangga usaha peternakan. Jagung yang dijadikan pakan ternak secara langsung oleh perusahaan peternakan dan rumah tangga usaha peternakan tersebut biasanya dicampur dengan gabah dan biji-bijian lain.

Sebagai informasi tambahan bahwa, komoditi jagung tahun 2019 khususnya untuk institusi hotel, restoran dan katering masih menggunakan konsumsi jagung tahun 2017. Dengan asumsi bahwa konsumsi jagung tahun 2019 tidak mengalami perubahan.

Tabel 3.17 Konsumsi Jagung Menurut Provinsi (ton), 2017 dan 2019

_		2017			2019		
Provinsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Rumah Rumah Total Tangga Tangga Konsums Susenas) (VKBP) 1)		Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Rumah Di Luar Rumah Tangga Tangga <sup>2)</sup>		
(1)	(2) (3)		(4)	(5)	(6)	(7)	
Aceh	1 873,2	2 120,8	3 994,0	1 944,60	1 161,22	3 105,81	
Sumatera Utara	5 335,4	268 316,8	273 652,2	7 603,89	1 249 320,14	1 256 924,03	
Sumatera Barat	1 572,9	124 254,9	125 827,8	1 470,84	112 599,85	114 070,69	
Riau	3 000,7	1 580,6	4 581,4	3 086,09	72 984,23	76 070,32	
Jambi	1 343,4	1 885,0	3 228,4	1 464,16	1 656,22	3 120,38	
Sumatera Selatan	3 039,3	4 967,0	8 006,3	3 766,83	17 116,75	20 883,58	
Bengkulu	1 367,7	6 183,2	7 550,8	1 242,86	4 522,24	5 765,10	
Lampung	3 690,4	685 410,1	689 100,5	6 881,73	680 949,84	687 831,57	
Kep. Bangka Belitung	411	103	514	763,99	92,13	856,12	
Kep. Riau	891	542	1 433,3	1 055,59	524,51	1 580,10	
DKI Jakarta	6 947,8	101 326,6	108 274,4	10 223,00	176 609,10	186 832,10	
Jawa Barat	14 217,7	1 662 510,8	1 676 728,4	37 593,03	3 107 895,74	3 145 488,76	
Jawa Tengah	23 559,2	1 230 234,2	1 253 793,4	28 421,83	1 312 128,23	1 340 550,06	
DI Yogyakarta	2 867,3	5 280,1	8 147,4	3 042,91	2 806,16	5 849,06	
Jawa Timur	146 584,8	505 657,0	652 241,8	146 064,40	2 474 260,58	2 620 324,98	
Banten	3 486,8	49 665,7	53 152,5	6 621,18	1 879 566,38	1 886 187,56	
Bali	5 185,6	5 476,8	10 662,5	6 403,02	5 475,39	11 878,40	
Nusa Tenggara Barat	7 130,5	2 187,8	9 318,3	13 622,81	188 454,39	202 077,20	
Nusa Tenggara Timur	93 918,4	6 537,0	100 455,4	85 146,10	5 025,02	90 171,12	
Kalimantan Barat	2 502,1	6 158,0	8 660,1	2 911,26	2 378,08	5 289,35	
Kalimantan Tengah	1 331,1	4 588,0	5 919,1	1 092,38	581,49	1 673,87	
Kalimantan Selatan	2 519,3	206 098,1	208 617,4	3 051,45	149 749,15	152 800,60	
Kalimantan Timur	2 591,4	4 075,9	6 667,3	3 499,05	187 861,74	191 360,78	
Kalimantan Utara	342	86	428	672,85	78,91	751,76	
Sulawesi Utara	4 028,9	2 088,8	6 117,7	3 233,22	3 290,81	6 524,03	
Sulawesi Tengah	6 763,2	8 319,2	15 082,4	7 232,74	5 045,16	12 277,91	
Sulawesi Selatan	18 710,3	147 907,1	166 617,4	21 989,69	649 463,63	671 453,32	
Sulawesi Tenggara	7 387,7	2 754,2	10 141,9	10 162,03	1 624,22	11 786,26	
Gorontalo	11 126,6	1 774,3	12 900,9	8 231,11	1 769,46	10 000,57	
Sulawesi Barat	1 095,8	359	1 455,0	2 331,89	230,93	2 562,82	
Maluku	3 588,5	1 234,4	4 822,9	4 911,84	584,66	5 496,49	
Maluku Utara	373	236	609	878,62	219,60	1 098,21	
Papua Barat	339	801	1 139,6	384,99	432,06	817,05	
Papua	1 811,3	442	2 253,1	2 631,00	410,69	3 041,68	
Indonesia	390 934,5	5 051 160,3	5 442 094,8	439 632,98	12 296 868,69	12 736 501,67	
Industri IMK			•		145 703,23	145 703,23	
Indonesia	390 934,5	5 051 160,3	5 442 094,8	439 632,98	12 442 571,92	12 882 204,90	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hotel, Usaha PMM, Industri Pengolahan, dan Jasa Kesehatan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tidak termasuk Jasa Kesehatan

Tabel 3.18 Konsumsi Jagung per Kapita per Tahun Menurut Provinsi (kg), 2017 dan 2019

		2017			2019				
Provinsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP) <sup>1)</sup>	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga <sup>2)</sup>	Total Konsumsi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Aceh	0,36	0,41	0,77	0,37	0,22	0,58			
Sumatera Utara	0,38	18,87	19,24	0,52	85,34	85,86			
Sumatera Barat	0,30	23,42	23,71	0,27	20,55	20,82			
Riau	0,45	0,24	0,69	0,45	10,68	11,13			
Jambi	0,38	0,54	0,92	0,41	0,46	0,87			
Sumatera Selatan	0,37	0,60	0,97	0,44	2,01	2,46			
Bengkulu	0,71	3,21	3,92	0,63	2,29	2,92			
Lampung	0,45	82,90	83,34	0,81	80,51	81,33			
Kep. Bangka Belitung	0,29	0,07	0,36	0,53	0,06	0,59			
Kep. Riau	0,43	0,26	0,69	0,47	0,23	0,70			
DKI Jakarta	0,67	9,79	10,46	0,97	16,81	17,79			
Jawa Barat	0,30	34,73	35,02	0,77	63,40	64,16			
Jawa Tengah	0,69	35,97	36,66	0,82	37,97	38,80			
DI Yogyakarta	0,76	1,41	2,17	0,79	0,73	1,51			
Jawa Timur	3,74	12,89	16,62	3,68	62,25	65,93			
Banten	0,28	4,01	4,29	0,52	147,83	148,35			
Bali	1,22	1,29	2,52	1,47	1,26	2,72			
Nusa Tenggara Barat	1,44	0,44	1,89	2,64	36,58	39,22			
Nusa Tenggara Timur	17,83	1,24	19,08	15,66	0,92	16,58			
Kalimantan Barat	0,51	1,25	1,76	0,58	0,47	1,05			
Kalimantan Tengah	0,51	1,77	2,28	0,41	0,22	0,63			
Kalimantan Selatan	0,61	50,22	50,84	0,72	35,52	36,24			
Kalimantan Timur	0,73	1,15	1,87	0,97	51,90	52,87			
Kalimantan Utara	0,50	0,13	0,62	0,97	0,11	1,08			
Sulawesi Utara	1,64	0,85	2,49	1,30	1,32	2,62			
Sulawesi Tengah	2,29	2,82	5,10	2,38	1,66	4,04			
Sulawesi Selatan	2,16	17,06	19,22	2,49	73,64	76,13			
Sulawesi Tenggara	2,85	1,06	3,92	3,82	0,61	4,42			
Gorontalo	9,56	1,52	11,09	7,00	1,50	8,50			
Sulawesi Barat	0,83	0,27	1,10	1,72	0,17	1,89			
Maluku	2,07	0,71	2,78	2,78	0,33	3,11			
Maluku Utara	0,31	0,20	0,51	0,71	0,18	0,89			
Papua Barat	0,37	0,88	1,25	0,40	0,45	0,85			
Papua	0,56	0,14	0,69	0,79	0,12	0,91			
Indonesia	1,50	19,35	20,84	1,65	46,07	47,72			
Industri IMK					0,55	0,55			
Indonesia	1,50	19,35	20,84	1,65	46,62	48,26			
	_,-,-	,	=-/	-,	,.=	,			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hotel, Usaha PMM, Industri Pengolahan, dan Jasa Kesehatan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tidak termasuk Jasa Kesehatan

# DATA

**MENCERDASKAN BANGSA** 



# BADAN PUSAT STATISTIK

JI. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta, 10710 Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046 Homepage: https://www.bps.go.id, E-mail: bpshq@bps.go.id